



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM.....2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA 8

A. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....8

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA.....8

2.2 SUMBER DAYA SPKD 14

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA 17

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 38

2.5 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN 40

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....41

2.6 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.....41

2.7 ISU STRATEGIS.....45

2.8 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (RPJPD KAB. MINAHASA TAHUN 2005-2025).....46

2.9 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN PARIWISATA, KEMENTRIAN EKONOMI KREATIF DAN KEMENTRIAN KEBUDAYAAN. 49

2.10 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 55

2.11 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....55

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....58

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ...58

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....61

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....65

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 65

4.2 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....118

4.3 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....120

BAB V PENUTUP 122

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 mempunyai arti strategis karena merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupten Minahasa Tahun 2025- 2029.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika :

- I. Pendahuluan;
- II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa;
- III. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
- IV. Prohram, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- V. Penutup.

Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selama 5 (lima); 2025-2029.

Melalui Penyusunan Renstra diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 ini dibuat, sebagai acuan untuk melaksanakan Program Kerja SKPD.

**Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Minahasa**

**FENTY T.W.LAPIAN, SE
PEMBINA TINGKAT I
19681002 198803 2 008**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan upaya sistematis dan terencana untuk mengubah kondisi bangsa menjadi keadaan yang makin lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat pada umumnya dan berkelanjutan. Pembangunan perlu direncanakan agar terarah, terpadu, dan terkordinasi ditingkat pusat sampai di daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk mendukung usaha pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah bidang Kebudayaan dan Kepariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat rencana kinerja dalam kurun waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen Rencana Strategis merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara terintegratif terpadu dengan dokumen perencanaan yang lain dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sehingga tercipta sinkronisasi berbagai program pembangunan yang saling mendukung.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan Rencana Strategis dengan dokumen Perencanaan lainnya,

❖ Hubungan RENSTRA dengan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Minahasa Kabupaten Minahasa yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif.

❖ **Hubungsn RENSTRA dengan RENJA-SKPD**

RENJA-SKPD Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasas sebagai dokumen peencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA.

Evaluasi terhadap pola pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang telah dilaksanakan melalui berbagai tanggapan, kritik dan saran merupakan input dalam perumusan penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga program yang dirumuskan dalam pola pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat sesuai dengan perkembangan di era globalisasi ini. Oleh karena itu pemasaran adalah suatu kegiatan yang merangkul semua pihak yang mempengaruhi dan menerobos semua permasalahan dan pengembangan aspek kebudayaan dan pariwisata.

Berkaitan dengan konsep pemasaran tersebut maka Kabupaten Minahasa melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan penelusuran dan kajian tentang bagaimana mengembangkan dan memasarkan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Minahasa, yaitu dengan melakukan langkah strategis dalam membangun daya saing dan memasarkan Kabupaten Minahasa melalui “Pesona Minahasa”:

1. Menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan;
2. Memperlakukan Wisatawan secara baik;
3. Menyiapkan dan membangun nuansa dan kawasan wisata yang aman dan nyaman;
4. Promosi wisata
5. Kerjasama antar pelaku industri pariwisata;
6. Melestarikan nilai-nilai budaya yang bersifat multikultural.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis disusun berdasarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2025- 2029 yaitu sebagai berikut :

Penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 19. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembar Negara RI Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 27. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024);
 29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru;
 32. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tentang Tim Penyusunan Renstra Disbudpar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, yaitu :

- 1. Maksud: Menjamun adanya konsistensi Pelaksanaan Program terhadap masalah dan potensi daerah serta kegiatan rutin sesuai dengan ketentuan pembangunan pariwisata dan kebudayaan daerah;
 - a. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program pembangunan yang sudah difokuskan secara partisipatif dengan semua Stake Holder pelaku pariwisata mulai dari penetapan misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sehingga dengan demikian setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran harus mengacu pada Renstra Dinas yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Minahasa 2024-2026;
 - b. Memperkuat landasan penetapan program dan kegiatan tahunan dinas secara kronologis dan berkelanjutan.
- 2. Tujuan:
 - a. Menjadi kerangka acuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Minahasa untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam proses penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Mengarahkan fokus pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan Rencana Strategis, yang saling berkaitan dengan visi dan misi dalam mewujudkan Kabupaten Minahasa sebagai salah satu destinasi pariwisata;
 - c. Mensosialisasikan rencana strategis kepada stakeholder dan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Adapun sistematika penulisan **Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**, sebagai berikut :

- BABI : Pendahuluan.
 - 1.1 Latar Belakang.
 - 1.2 Landasan Hukum.
 - 1.3 Maksud dan Tujuan.
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	Kabupaten Minahasa.
	2.2 Sumber daya SPKD.
	2.3 Kinerja Pelayanan SPKD Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SPKD.
	2.5 Sasaran Kelompok Pelayanan
	2.6 Identifikasi Permasalahan
	2.7 Isu Strategis
	2.8 Telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	2.9 Telaah Renstra Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pariwisata.
	2.10 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	2.11 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB III	: Tujuan, Sasaran, dan Startegis Peran dan Arah Kebijakan
	3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	: Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
	4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
	4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA

A. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan sudah dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

2. Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 3) Penyusunan rencana dan program pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Pengkoordinasian, fasilitasi dan pemberian pertimbangan teknis atas izinusaha pariwisata;
- 5) Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
- 6) Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
- 8) Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan promosi Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9) Pelaksanaan perkembangan sistem informasi, pemasaran

- Kebudayaan dan Pariwisata;
- 10) Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pengiriman, misi kesenian, dalam rangka kerjasama luar negeri;
 - 11) Pelaksanaan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba;
 - 12) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
 - 13) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
 - 14) Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan;
 - 15) Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 16) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan museum;
 - 17) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - 18) Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
 - 19) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

3. Struktur Organisasi:

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang-bidang
- d. Sub Bagian dan Kepala Seksi

Adapun tugas-tugas sebagaimana Struktur Organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas:
 1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, mengacu pada program Nasional dan daerah;
 3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan budaya;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pariwisata dan budaya;
 5. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang pariwisata dan budaya;
 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
 7. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertical dan horizontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
 2. Penyusunan program dan rencana kegiatan;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian;
 4. Penyelenggaraan urusan umum;
 5. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
 6. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 7. Penyelenggaraan urusan keuangan;
 8. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
 9. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
 10. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- c. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang objek wisata, rekreasi dan hiburan umum, akomodasi rumah makan dan bar serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan daerah di Bidang Kepariwisata
 2. Pelaksanaan pedoman Nasional, Provinsi dan penetapan pedoman penyelenggaraan kepariwisataan daerah;
 3. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepariwisataan;
 4. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan, akomodasi rumah makan dan bar;
 5. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pertimbangan teknis atas ijin kegiatan kepariwisataan;
 6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
 7. Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kegiatan.
- d. Bidang Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang informasi dan promosi, penyuluhan dan bimbingan wisata,

kerjasama dan pemasaran serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemasaran dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang pemasaran dan promosi pariwisata;
 2. Pelaksanaan pedoman Nasional, Provinsi dan penetapan pedoman penyelenggaraan pemasaran dan promosi pariwisata;
 3. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemasaran dan promosi pariwisata;
 4. Pelaksanaan kerjasama di bidang pariwisata;
 5. Pelaksanaan promosi pariwisata;
 6. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
 7. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan wisata;
 8. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
 9. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.
- e. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pelestarian dan budaya tradisional, permusiuman, kepurbakalaan dan arkeologi, sejarah dan nilai tradisional serta melakukan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan;
 2. Pelaksanaan pedoman Nasional, Provinsi dan penetapan pedoman di bidang kebudayaan;
 3. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kebudayaan;
 4. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan;
 5. Pelaksanaan pelestarian dan budaya tradisional;
 6. Pelaksanaan permuseuman, kepurbakalaan dan arkeologi;
 7. Pelaksanaan sejarah dan nilai tradisional;
 8. Pelaksanaan evaluasi; dan
 9. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.
- f. Bidang Kesenian mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pengembangan dan pelestarian seni tradisional dan non tradisional, atraksi seni, pengembangan minat dan bakat serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kesenian menyelenggarakan fungsi :

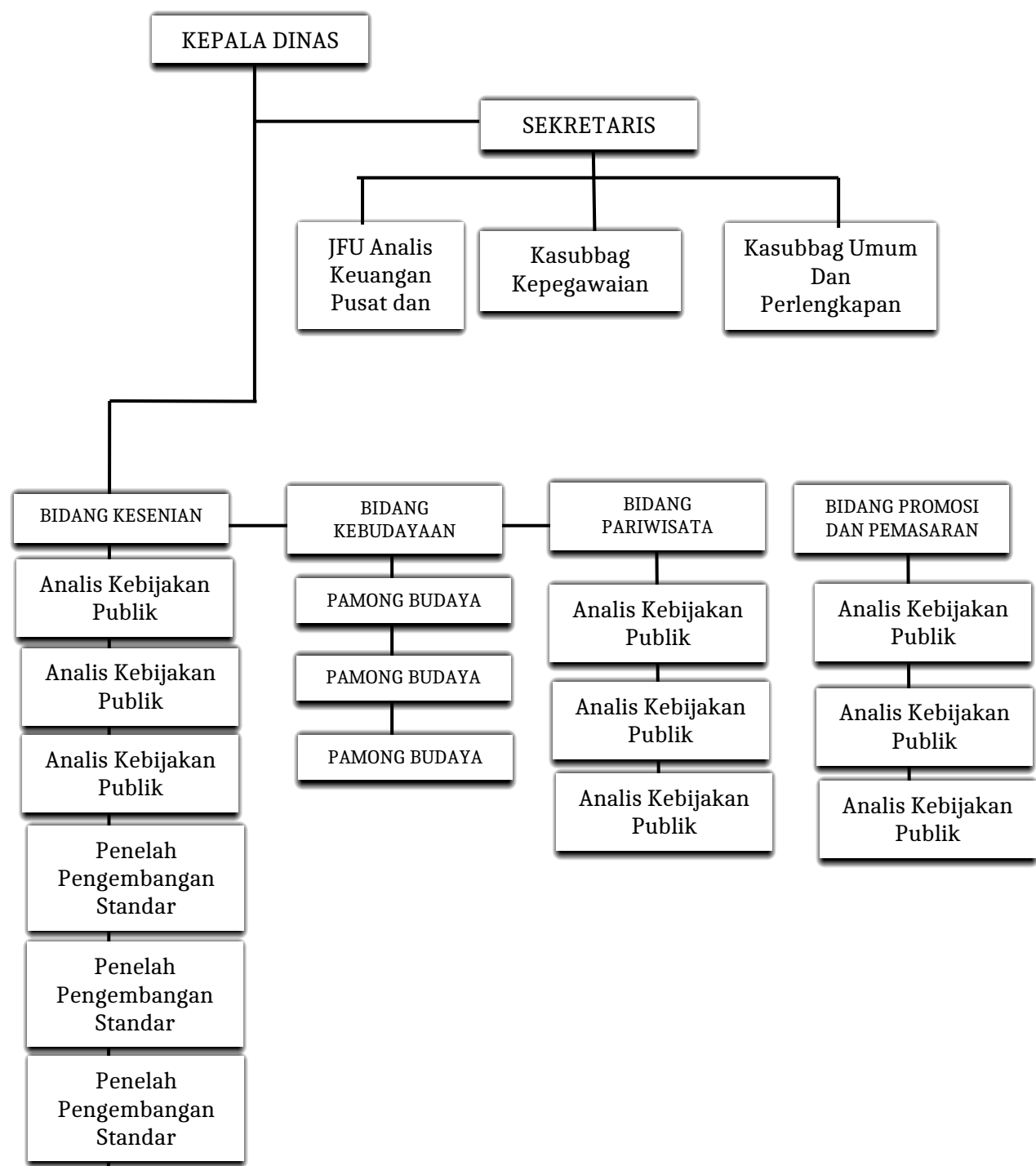
1. Pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan;

2. Pelaksanaan pedoman Nasional dan Provinsi seta penetapan pedoman di bidang Kesenian;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang keseian;
4. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pelestarian seni tradisional dan non-tradisional;
6. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan atraksi seni;
7. Pelaksanaan pengembangan dan pengembangan minat dan bakat seni;
8. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian;
9. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
10. Pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan asset atau benda kesenian (Karya Seni);
11. Penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba seni;
12. Pelaksanaan evaluasi; dan
13. Penyusunan dan pelaporan hasil kegiatan.

Penjabaran Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa ke dalam bidang, sub bidang dan seksi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. Kasubag Kepegawaian;
 - c. Kasubag Umum dan Perlengkapan.
2. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Pamong Budaya;
 - b. Pamong Budaya.
3. Bidang Pemasaran dan Promosi, terdiri dari:
 - a. Analis Kebijakan Publik;
 - b. Analis Kebijakan Publik.
4. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Analis Kebijakan Publik;
 - b. Analis Kebijakan Publik.
5. Bidang Kesenian, terdiri dari:
 - a. Analis Kebijakan Publik;
 - b. Analis Kebijakan Publik;
 - c. Penelaah Pengembangan Standar;
 - d. Penelaah Pengembangan Standar;
 - e. Penelaah Pengembangan Standar.

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa



2.2 SUMBER DAYA SPKD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenMinahasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh:

- Kepala Dinas (Eselon II B)
 1. Sekretaris
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah sub Koordinasi Kepala Subbagian Program, Keuangan, dan Pelaporan (Eselon IV A)
 - Kepala Subbagian Kepegawaian (Eselon IV A)
 - Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan (Eselon IV A)
 2. Kepala Bidang Kesenian
 - Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Seksi Pengembangan, Pelestarian Seni Tradisional (Eselon IV A)
 - Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Seksi Atraksi Seni (Eselon IV A)
 - Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Seksi Pengembangan Minat (Eselon IV A)
 - Penelaah Pengembangan Standar (Staff)
 - Penelaah Pengembangan Standar (Staff)
 - Penelaah Pengembangan Standar (Staff)
 3. Kepala Bidang Pariwisata (Eselon III B)
 - Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Kepala Seksi Objek Wisata (Eselon IV A)
 - Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum (Eselon IV A)
 - Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Kepala Seksi Akomodasi, Rumah Makan dan Bar (Eselon IV A)
 4. Kepala Bidang Kebudayaan (Eselon III B)
 - Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Kepala Seksi Pelestarian dan Budaya Tradisional (Eselon IV A)
 - Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Kepala Seksi Permuseuman, kepurbakalaan, dan arkeologi (Eselon IV A)
 - Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional (Eselon IV A)

5. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran (Eselon III B)

- Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi (Eselon IV A)
- Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Kepala Seksi Penyuluhan Bimbingan Wisata (Eselon IV A)
- Analis Kebijakan Publik sub koordinasi Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran (Eselon IV A)

a. Susunan Kepegawain dan Perlengkan (Inventaris)

1. Kepegawaian

Sesuai data terakhir pada bulan Maret Januari 2021, keadaan pegawai menurut Golongan, Pendidikan, Diklat Penjenjangan dan Eselon adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai	:	19 orang
- Golongan II	:	0 orang
- Golongan III	:	15 orang
- Golongan IV	:	4 orang
b. Pendidikan		
- SMU	:	0 orang
- D3/Sarjana Muda	:	0 orang
- S1	:	16 orang
- S2	:	3 orang
c. Diklat Penjenjangan		
- Sepada/Adum/Pim IV	:	5 orang
- Spama/Pim III	:	3 orang
- Spamen/Pim II	:	0 orang
d. Jabatan Struktural		
- Eselon II B	:	1 orang
- Eselon III A	:	1 orang
- Eselon III B	:	4 orang
- Eselon IV A	:	13 orang

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Minahasa

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	1
4.	IV/b	-
5.	IV/a	2
6.	III/d	13
7.	III/c	1
8.	III/b	2
9.	III/a	-
10.	II/d	-
11.	II/c	-
12.	II/b	-
13.	II/a	-

b. Sarana dan Prasarana Aset

Berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2025, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki asset tetap berupa : 5 Bidang tanah, 113 Peralatan dan mesin, 30 gedung dan bangunan, 6 jalan, jaringan dan irigasi, 25 Aset tetap lainnya serta 3 konstruksi dalam pengerjaan. Fasilitas Peralatan dan Mesin berupa 4 unit PC dan 8 unit laptop dalam kondisi baik yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses diseluruh ruangan. Jaringan ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun dapat diakses instansi lain serta masyarakat yang membutuhkan informasi. Memiliki fasilitas ruangan dengan meja dan kursi dan lemari yang memadai serta MCK yang layak dipakai, memiliki pula alat musik daerah berupa kulintang dan music bamboo klarinet serta pakaian tari-tarian dan perlengkapan.

Keberadaan barang /aset daerah yang ada di bawah tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tercatat dalam inventarisasi aset SKPD.

c. Anggaran

Selanjutnya untuk menggambarkan potensi anggaran pelayanan SKPD pada periode Renstra sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa dari sisi anggaran sektor pariwisata mengalami kenaikan setiap tahun, namun pada tahun 2017, terjadi pengurangan anggaran hingga tahun 2018, berfluktuatif sejak tahun 2018. Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa periode tahun 2013 sampai tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD SKPD
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun
2013 s/d 2024

TAHUN	TOTAL BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
2013	5.684.606.000	5.256.895.780	92,47	-
2014	9.510.662.000	8.248.505.602	86,73	-
2015	14.610.891.950	14.256.311.192	97,57	-
2016	19.286.612.000	18.141.432.237	94,06	-
2017	15.618.950.000	14.204.725.718	90,95	-
2018	7.972.245.631	7.141.730.862	89,59	-
2019	8.452.923.667	7.568.867.083	89,54	-
2020	9.351.501.182	8.335.083.693	89,13	-
2021	4.633.357.712	4.008.455.193	86,51	-
2022	6.186.523.009	5.309.133.369	88,76	-
2023	6.050.775.752	5.868.491.899	96,99	-
2024	6.827.955.825	6.062.899.408	88,80	-

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA

Kinerja Pelayanan SKPD Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, antara lain :

- 1. Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- 2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum;
- 3. Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD;

Tabel 2.4 (T.C 23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peninggung jawab	
				2024		2025		2026		2024			2025		2026		2024		2025		2026		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5		6		7		8			9		10		11		12		13		14
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																					
I	1.1 Peningkatan Akuntabilitas Dan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	4	Score	2.790.568.223	4	Dokumen	13.440.338	4	Score	8.063.951.115	4	Score	2.533.963.058		100,00	90,80					Disbudpar
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4	Dokumen	4.846.635	3	Dokumen	6.470.715	4	Dokumen	34.934.000	4	Dokumen	3.694.635		100,00	76,23					Disbudpar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	4.846.635	1	Dokumen	1.002.219	3	Dokumen	9.000.000	3	Dokumen	3.694.635		100,00	76,23					Disbudpar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	4.500.000	1	Dokumen	-		100,00	#DIV/0!					Disbudpar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.499.610	1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	-		100,00	#DIV/0!					Disbudpar

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peninggung jawab		
				2024		2025		2026		2024			2025		2026		2024		2025		2026			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu	
1	2	3	4	5		6		7		8			9		10		11		12		13		14	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																						
I	1.1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	4	Score	2.790.568.223	4	Dokumen	13.440.338	4	Score	8.063.951.115	4	Score	2.533.963.058			100,00	90,80					Disbudpar
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	4.000.000	1	Dokumen	-			100,00	#DIV/0!					Disbudpar
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	-	1	Laporan	4.467.794	1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	-			100,00	#DIV/0!					Disbudpar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	11.434.000	1	Laporan	-			100,00	#DIV/0!					Disbudpar
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	-				1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	-			100,00	#DIV/0!					Disbudpar

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-									REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-									Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peringgung jawab
				2024			2025			2026			2024			2025		2026		2024		2025		2026				
				Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12		13		14		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	12	Bulan	2.341.655.593	12	Bulan	2.962.517.276	12	Bulan	7.100.280.000	12	Bulan	2.210.046.500							#VALUE!	94,38				Disbudpar	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang	2.341.655.593	19	Orang	2.956.517.163	19	Orang	7.088.280.000	19	Orang	2.210.046.500							100,00	94,38				Disbudpar	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dok		1	Dok		1	Dok	0	1	Dok	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80	Dok		80	Dok	999.680	80	Dok	2.000.000	80	Dok	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok		1	Dok		3	Dok	0	1	Dok	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1	Laporan	2.500.164	1	Laporan	5.000.000	1	Laporan	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Perencanaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Perencanaan dan Tindak Lanjut Perencanaan	1	Dok		1	Dok		1	Dok	0	1	Dok	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	Laporan		2	Laporan	2.500.269	2	Laporan	5.000.000	2	Laporan	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	0	1	Laporan	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-									REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-									Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peninggung jawab
				2024			2025			2026			2024			2025			2026			2024		2025		2026		
				Target		Pagu	Target		Pagu	Target		Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11		12		13		14
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Dokumen	1.039.793	1	Dokumen	3.498.521	1	Dokumen	8.000.000	1	Dokumen	-						#VALUE!	-					Disbudpar	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-						#VALUE!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-						#VALUE!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	0	1	Laporan		1	Laporan	-	1	Laporan	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	1	Laporan	999.000	1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1.039.793	1	Laporan	1.499.688	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	1.039.793						100,00	100,00					Disbudpar	
		Peratausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Peratausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	-	1	Laporan	999.833	1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-						#VALUE!	#DIV/0!					Disbudpar	

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2024			2025			2026		2024			2025		2026			2024		2025		2026				
				Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu			
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11		12		13		14
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	19	Stel	0	19	Stel	52.450.109	21	Stel	105.700.000	19	Stel	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit			Unit	0		Unit	5.000.000		Unit	-						#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	-	2	Paket	49.950.000	2	Paket	94.200.000	1	Paket	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		1	Dokumen	2.500.109	1	Dokumen	4.500.000	1	Dokumen	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Pegawai			Pegawai			Pegawai	-		Pegawai	-						#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Laporan			Laporan			Laporan	-		Laporan	-						#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		ASN			ASN			ASN	-		ASN	-						#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Pegawai			Pegawai			Pegawai	-		Pegawai	-						#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang			Orang			Orang	-		Orang	-						#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang			Orang			Orang	-		Orang	-						#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peninggung jawab					
				2024			2025			2026		2024			2025		2026			2024		2025		2026							
				Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu						
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	84.742.342	12	Bulan	209.351.375	12	Bulan	357.999.115	12	Bulan	64.004.744							100,00	75,53						Disbudpar		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.791.374		1	Paket	5.500.000	1	Paket	1.791.374								100,00	100,00						Disbudpar			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.348.307	1	Paket	998.445	1	Paket	110.000.000	1	Paket	9.789.150							100,00	86,26						Disbudpar		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	-	1	Paket	43.421.650	0	Paket	2.000.000	0	Paket	-							#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	1	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-							#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.020.811	0	Paket	-	1	Paket	15.000.000	1	Paket	2.020.811							100,00	100,00						Disbudpar		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dok	-	0	Paket	2.999.900	0	Dok	-	0	Dok	-							#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	paket	-	1	Dok	-	0	paket	-	0	paket	-							#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Lap	14.846.250	0	Paket	-	1	Lap	32.750.000	1	Lap	14.846.919							100,00	100,00						Disbudpar		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Lap	54.735.600	1	Lap	15.000.000	2	Lap	192.749.115	2	Lap	52.134.224							100,00	95,25						Disbudpar		
		Peratuaahaan Asip Diranis pada SKPD	Jumlah Dokumen Peratuaahaan Asip Diranis pada SKPD	0	Dok	-	2	Lap	146.931.380	0	Dok	-	0	Dok	-							#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-							#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar		

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-									REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-									Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peranggung jawab
				2024			2025			2026			2024			2025			2026			2024		2025		2026		
				Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		K	RP	RP	Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11		12		13		14
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur sesuai RKBM	50	%	20.785.860	50	%	79.893.582	50	%	121.000.000	50	%	5.745.360							100,00	27,64					Disbudpar
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0					Unit	0	0	Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	0			Unit		Unit	0	0	Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	Unit	0			Unit		Unit	0	0	Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	Unit	0			Unit		Unit	0	0	Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	5.745.360			Unit	1	Paket	46.000.000	1	Paket	5.745.360							100,00	100,00					Disbudpar
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	15.040.500	1	Paket	3.914.082	1	Unit	75.000.000	1	Unit	15.030.000							100,00	99,93					Disbudpar
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit	0	1	Unit	75.979.500		Unit	-		Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit	0		Unit			Unit	-		Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0		Unit			Unit	-		Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0		Unit			Unit	-		Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0		Unit			Unit	-		Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peninggung jawab		
				2024			2025			2026		2024			2025		2026			2024		2025		2026				
				Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu			
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11		12		13		14
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Bulan	297.598.000	12	Bulan	364.546.512	12	Bulan	214.598.000	12	Bulan	221.243.139							100,00	74,34					Disbudpar
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4.000.000		Laporan	8.000.000	1	Laporan	17.000.000	1	Laporan	4.000.000							100,00	100,00					Disbudpar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	17.598.000		Laporan	19.947.712	12	Laporan	53.598.000	12	Laporan	16.119.781							100,00	91,60					Disbudpar
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	-		Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-							100,00	#DIV/0!					Disbudpar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	276.000.000		Laporan	204.000.000	12	Laporan	144.000.000	12	Laporan	275.760.000							100,00	99,91					Disbudpar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/taik fungsi	85,00	%	39.900.000	83	%	140.598.800	85,00	%	121.440.000	85,00	%	29.228.680							100,00	73,25					Disbudpar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	38.480.000		Unit		1	Unit	115.440.000	1	Unit	38.478.680							100,00	100,00					Disbudpar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	-		Unit	38.480.000	1	Unit	-	1	Unit	-							100,00	#DIV/0!					Disbudpar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	Unit	-		Unit		0	Unit	-	1	Unit	-							100,00	#DIV/0!					Disbudpar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	Unit	-		Unit		0	Unit	-	0	Unit	-							#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peninggung jawab	
				2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
		Pereliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Unit	-	Unit	0	Unit	-	0	Unit	-			#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1.420.000	Unit	1	Unit	6.000.000	1	Unit	600.000			100,00	42,25					Disbudpar	
		Pereliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Unit	2.110.000	0	Unit	-	0	Unit	-		#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pereliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	Unit	-	Unit		0	Unit	-	0	Unit	-		#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Unit		1	Unit	-	0	Unit	-		#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	Unit	100.008.800	1	Unit	-	1	Unit	-		100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Unit	-	1	Unit	-	0	Unit	-		#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pereliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pereliharaan/Rehabilitasi	0	Unit	-	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-		#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
																#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
	2.1 Peningkatan Pelestarian Perwujudan Kebudayaan Daerah Minahasa	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian warisan budaya	83,55	%	675.294.425	Unit	38.480.000	84,20	%	422.000.000	83,55	%	504.730.502			100,00	74,74					Disbudpar
			Persentase SDM yang terlibat dalam pengembangan kebudayaan				Unit						-			#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Perwujudan kebudayaan yang dimanfaatkan (Permendagri 18/20)	2	OPK	577.744.425	2 Buah	127.048.929	3	OPK	102.500.000	2	OPK	442.180.502			100,00	76,54					Disbudpar

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output/Sub Kegiatan)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peninggung jawab					
				2024			2025			2026		2024			2025		2026			2024		2025		2026							
				Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu						
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	OPK	302.254.600				3	OPK	52.500.000	2	OPK	258.694.880							100,00	85,59						Disbudpar		
		Pembinaan Sumber Daya dan Manusia, Lembaga, dan Pranala Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranala Kebudayaan	25	Org	275.489.825		2	OPK	116.257.179	27	Org	50.000.000	25	Org	273.001.772							100,00	99,10						Disbudpar	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	7	Jenis	2.550.000		25	Org	10.791.750	8	Jenis	129.500.000	7	Jenis	2.550.000							100,00	100,00						Disbudpar	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	OPK	2.550.000		8	Jenis	-	3	OPK	52.500.000	1	OPK	2.550.000							100,00	100,00						Disbudpar	
		Pembinaan Sumber Daya dan Manusia, Lembaga, dan Pranala Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranala Tradisional	1	Lap	-				3	Lap	40.000.000	1	Lap	-								100,00	#DIV/0!						Disbudpar	
		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0	Org/Lembaga	-		2	Objek		1	Org/Lembaga	37.000.000	0	Org/Lembaga	-							#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	1	Objek LA	95.000.000		1	Lap		1	Objek LA	190.000.000	1	Objek LA	60.000.000							100,00	63,16						Disbudpar	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	Objek LA	0		1	Org/Lembaga		1	Objek LA	190.000.000	1	Objek LA	-							100,00	#DIV/0!						Disbudpar	
		Pembinaan Sumber Daya dan Manusia, Lembaga, dan Pranala Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranala Adat yang Dibina	25	Org	95.000.000		0	Org	95.000.000	106,82	Org	-	25	Org	74.500.000							100,00	78,42						Disbudpar	
		Penyediaan Sarana dan Pemasaran Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Pemasaran Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0	Sapras	-		1	Sapras		#REF!	Sapras	-	0	Sapras	-							#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar	

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peringgung jawab		
				2024				2025				2026				2024				2025				2026				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu						
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11		12		13		14
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	70	%	194.028.070	81,82	%	211.269.090	90,91	%	124.000.000	70	%	167.035.280							100,00	86,09				Disbudpar	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Karya Budaya dan Kesenian Tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	10	Jenis	194.028.070	10	Jenis	211.269.090	11	Jenis	124.000.000	10	Jenis	167.035.280							100,00	86,09				Disbudpar	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Juntah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40	Org	194.028.070	60	Org	159.042.705	40	Org	84.000.000	40	Org	182.607.870							100,00	94,11				Disbudpar	
		Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standaisasi	10	Org	-	15	Org	-	11	Org	20.000.000	10	Org	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sanggar/Grup	Sanggar/Grup	-	30	Sanggar/Grup	52.226.385	40	Sanggar/Grup	20.000.000	Sanggar/Grup	Sanggar/Grup	-							#VALUE!	#DIV/0!				Disbudpar	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Yang dilestarikan	100	%	69.410.550	88,28	%	-	100	%	124.500.000	100	%	-							100,00	-				Disbudpar	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) (Permendagri 18/20)	Na	CB	-	Na	CB	-	1	CB	37.500.000	Na	CB	-							#VALUE!	#DIV/0!				Disbudpar	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0	CB	-	0	CB	-	1	CB	12.500.000	0	CB	-							#VALUE!	#DIV/0!				Disbudpar	
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	0	CB	-	0	CB	-	1	CB	25.000.000	0	CB	-							#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-									REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-									Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peninggung jawab
				2024			2025			2026			2024			2025			2026			2024		2025		2026		
				Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		K	RP	RP	Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11		12		13		14
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Cagar Budaya (Penyelamatan, Pemeliharaan dan pemugaran) (Permendagri 18/20)	112	CB	69.410.550	112	CB	-	112	CB	80.000.000	112	CB	-							100,00	-				Disbudpar	
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	112	CB	69.410.550	112	CB	-	112	CB	30.000.000	112	CB	64.385.550							100,00	92,76				Disbudpar	
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	112	CB	0	112	CB	-	112	CB	-	112	CB	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	112	CB	-	112	CB	-	112	CB	50.000.000	112	CB	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Perijinan membawa cagar budaya ke luar Kabupaten/Kota dengan dukungan data (Permendagri 18/20)	0	CB	-	0	CB	0	0	CB	7.000.000	0	CB	-							#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	
		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Peizinan ke Luar Daerah Provinsi	0	CB	-	0	CB	-	0	CB	-	0	CB	-							#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	
		Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0	CB	-	0	CB	-	0	CB	7.000.000	0	CB	-							#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	50	%	-	50	%	-	50	%	40.900.000	50	%	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pengelolaan, Pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum (Permendagri 18/20)	1	Bh	-	1	Bh	-	1	Bh	40.900.000	1	Bh	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1	Bh	-	1	Bh	-	1	Bh	15.900.000	1	Bh	-							100,00	#DIV/0!				Disbudpar	

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Pernanggung jawab		
				2024		2025		2026		2024			2025		2026		2024		2025		2026			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu	
1	2	3	4	5		6		7		8			9		10		11		12		13		14	
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	0	Org	-		0	Org	-	0	Org	-					#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	0	Akses	-		0	Akses	-	0	Akses	-					#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0	Sarpras	-		1	Sarpras	25.000.000	0	Sarpras	-					#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	0	Sarpras	-		0	Sarpras	-	0	Sarpras	-					#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
										-								#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
S.3 Peningkatan daya saing dan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan	7,00	1.548.864.000		7 %	9,00 %	2.321.249.538	7,00		1.442.627.882						100,00	93,14					Disbudpar
			Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	20,00	120.182		25 %	30,00 %		20,00	120.182	222.833						100,00	#DIV/0!					Disbudpar
			Tingkat Hunian Akomodasi (Person)	63,39				63,39 %		63,39			-						#VALUE!	#DIV/0!				
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara/ peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten di Kabupaten Minahasa	482.948	Orang	1.548.864.000	616,185 Org	2.349.473.336	1.910.174 Orang	2.321.249.538	#####	Orang	1.442.627.882					100,00	93,14					Disbudpar
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1,00	Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	68.396.000	3 Dokumen	105.000.000	1,00	Dokumen	-					100,00	-					Disbudpar

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Penanggung jawab									
				2024			2025			2026			2024			2025			2026				2024			2025			2026		
				Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		K	RP	RP	Target	Pagu		Target	Pagu			Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14
		Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2	Lap	1.513.864.000	-	1	Dokumen		6	Lap	2.191.249.538	2	Lap	1.506.550.136							100,00	99,52					Disbudpar		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Dokumen	-		1	Dokumen	22.179.157	3	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	-							100,00	#DIV/0!					Disbudpar		
		Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Dokumen	-	1	Laporan	2.223.898.179		1	Dokumen	-	0	Dokumen	-							-	#DIV/0!					Disbudpar		
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Dokumen	0	2	Dokumen	35.000.000		3	Dokumen	-	1	Dokumen	-							100,00	#DIV/0!					Disbudpar		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata	9,03 %		574.085.012	9,05 %				9,07 %		1.619.500.000	9,03 %		54.000.000						100,00	9,41					Disbudpar			
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dibangun, dikembangkan, dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya	1	Destinasi	399.845		2	Destinasi	142.918.880	3	Destinasi	227.500.000	1	Destinasi	-						100,00	-					Disbudpar			
		Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	DTW	-		1	DTW		3	DTW	5.000.000	1	DTW	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar			
		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-		0	Dokumen		2	Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar			
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	155	Lokasi	-		155	Lokasi		160	Lokasi	11.500.000	155	Lokasi	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar			
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-		1	Dokumen		3	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	-						100,00	#DIV/0!					Disbudpar			
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Unggulan				399.845			Lokasi	142.918.880		Sapras				99.845						#DIV/0!	24,97					Disbudpar			

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output/Sub Kegiatan)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peringgung jawab			
				2024		2025		2026		2024			2025		2026		2024		2025		2026				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu		
1	2	3	4	5		6		7		8			9		10		11		12		13		14		
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola	1	KSP	573.285.380			755.554.790	3	KSP	1.001.000.000	1	KSP	54.000.000						100,00	9,42			Disbudpar
		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-						#DIV/0!	#DIV/0!			Disbudpar
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	1	Dokumen	500.270.000	2	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	-						100,00	#DIV/0!			Disbudpar
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2	Kawasan	-	0	Kawasan		6	Kawasan	600.000.000	2	Kawasan	-						100,00	#DIV/0!			Disbudpar
		Pengadaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6	Sapras	517.185.424	6	Sapras	0	6	Sapras	344.000.000	6	Sapras	72.000.000						100,00	13,92			Disbudpar
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Laporan	99.956	1	Laporan	1.717.990	3	Laporan	7.000.000	1	Laporan	99.956						100,00	100,00			Disbudpar
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Laporan	0	1	Laporan	0	0	Laporan	-	1	Laporan	-						100,00	#DIV/0!			Disbudpar
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Lokasi	0	1	Lokasi	0	0	Lokasi	-	1	Lokasi	-						100,00	#DIV/0!			Disbudpar
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikelola	1	Lokasi	1.240.000.000	1	Lokasi	957.926.852	3	Lokasi	381.000.000	1	Lokasi	-						100,00	-			Disbudpar
		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	Dokumen	-				0	Destinasi	-	0	Destinasi	-						#DIV/0!	#DIV/0!			Disbudpar
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	Dokumen	-				0	Dokumen	-	0	Dokumen	-						-	#DIV/0!			Disbudpar
		- Destinasi Pariwisata Sonder (KPL Air Terjun Tincep, Kawasan Wisata Uap Belerang di Desa Ielim dan KPL Arung Jeram Timbukan)		6	Kawasan	600.000.000									-					-	-			Disbudpar	

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Panggung jawab
				2024		2025		2026		2024			2025		2026			2024		2025		2026				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5		6		7		8			9			10			11		12		13		14	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	6	Sapras		584.000.000		902.934.500	2	Destinasi	100.000.000	0	Destinasi	-					-	-				Disbudpar	
		Pengadaan/Peremajaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3	Laporan		56.000.000		49.992.480	5	Sapras	226.000.000	5	Sapras	-					166,67	-				Disbudpar	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Laporan		-		4.999.872	3	Laporan	55.000.000	1	Laporan	-					33,33	#DIV/0!				Disbudpar	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	Lokasi		-			0	Laporan		1	Laporan	-					#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	Lokasi					0	Lokasi		1	Lokasi	-					#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDP Pariwisata yang ditetapkan	0	TDP	399.845	0	TDP	0	0	TDP	10.000.000	0	TDP	-					#DIV/0!	-				Disbudpar	
		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen	2.000.000	0	Dokumen	-					#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	0	TDP		0	TDP		1	TDP	-	0	TDP	-					#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	
		Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	0	Laporan		0	Laporan		1	Laporan	-	0	Laporan	-					#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	0	Laporan		0	Laporan		3	Laporan	3.000.000	0	Laporan	-					#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar	

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
		Fasilitasi Standaisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	5.000.000	1	Unit	-					100,00	#DIV/0!				Disbudpar
		Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Mikro	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Mikro	1	Laporan	399.845	1	Laporan		Laporan	3.000.000	1	Laporan	99.845				100,00	24,97				Disbudpar
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	50 %	499.787		3.498.157	100 %		574.500.000	50 %		499.787					100,00	100,00				Disbudpar
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berkespresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1	Prasarana	399.787	1	Prasarana		1	Sapras	60.000.000	1	Prasarana	-			100,00	-				Disbudpar
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang dikembangkan	1	Sapras	399.787		1	Sapras	60.000.000	1	Sapras	399.787					100,00	100,00				Disbudpar
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang	1	Ekosistem Ekraf	100.000	1	Ekosistem Ekraf		1	Ekosistem	514.500.000	1	Ekosistem Ekraf	-			100,00	-				Disbudpar
		Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		Hasil Riset	0			0	Hasil Riset	-		Hasil Riset	-				#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar
		Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	4	Pelatihan	-			4	Pelatihan	350.400.000	4	Pelatihan	-				100,00	#DIV/0!				Disbudpar
		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif			0			0	Pendanaan	-			-				#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar
		Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0	Fasilitas	0			2	Fasilitas	150.000.000	0	Fasilitas	-				#DIV/0!	#DIV/0!				Disbudpar

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Peninggung jawab	
				2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		Dok	0		0	Dokumen	-		Dok	-				#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Penyerahan Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan		Rp			0	Insentif	-		Rp	-				#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1	Dokumen	0		0	Dokumen	-	1	Dokumen	-				100,00	#DIV/0!					Disbudpar
		Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	0	Dokumen	0		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-				#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar
		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	Dokumen	0		2.499.922	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	-				100,00	#DIV/0!					Disbudpar
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	Dokumen	100.000		998.235	Dokumen	9.100.000	1	Dokumen	100.000				100,00	100,00					Disbudpar
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor keparawisataan	30 %		1.031.205.700	30 %	533.341.604	100 %	409.000.000	30 %	230.848.140					100,00	22,39					Disbudpar
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang meningkatkan kapasitasnya	140	Org	651.022.850		341.541.100	420	Orang	224.000.000	140	Org	230.848.140			100,00	35,46					Disbudpar
		Pengembangan Kompetensi SDM Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	20	Org	-	20	Org	140	Orang	174.000.000	20	Org	-			100,00	#DIV/0!					Disbudpar

NO	Sasaran		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output/Sub Kegiatan)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-								Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Perangkat Daerah Perngging jawab
				2024		2025		2026		2024			2025		2026			2024		2025		2026				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	K	RP	RP	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5		6		7		8			9			10			11		12		13		14	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata	20	Org	-	20	Org	60	Orang	25.000.000	20	Org	-					100,00	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	0	Org	0	0	Org	0	Orang	-	0	Org	-					#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0	Org	0	0	Org	20	Orang	25.000.000	0	Org	-					#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0	Laporan	0	0	Laporan	1	Laporan	-	0	Laporan	-					#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	Org	651.022.850	20	Org	341.541.100	0	Orang	-	0	Org	611.588.490				#DIV/0!	93,94					Disbudpar	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	Rekom	0	0	Rekom	0	Laporan	-	0	Rekom	-					#DIV/0!	#DIV/0!					Disbudpar	
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	2	Pelatihan	380.182.850	2	Pelatihan	191.800.504	6	Pelatihan	185.000.000	2	Pelatihan	-				100,00	-					Disbudpar	
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50	Org	380.182.850	50	Org	191.800.504	150	Orang	160.000.000	50	Org	365.135.050				100,00	96,04					Disbudpar	
		Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		Laporan			Laporan	0	Laporan			Laporan	-				#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar	
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif		Orang			Orang	2	Orang	25.000.000		Orang	-				#DIV/0!	#DIV/0!						Disbudpar	

Tondano, September 2025
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Minahasa

Fenty T.W Lopian, SE
PEMBINA TKT I
NIP. 19681002 198803 2 008

Tabel 2.5
TABEL TC. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	
			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
(1)	(3)	(4)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	(22)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	3.298.995.639	2.904.479.000	3.212.814.617	3.232.995.662	3.294.281.000	3.173.662.000	2.904.479.000	3.212.814.617	3.020.362.986		96,20%	100,00%	100,00%	93,42%		Disbudpar
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian warisan budaya	112.280.000	72.742.206	156.913.630	391.398.750	89.000.000	44.991.000	72.617.206	156.913.630	390.510.502		40,07%	99,83%	100,00%	99,77%		Disbudpar
3	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	577.630.000	568.442.206	2.100.000	47.100.000	89.000.000	541.930.000	562.079.648		47.090.000		93,82%	98,88%	0,00%	99,98%		Disbudpar
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	44.991.000	72.617.206	156.913.630	-	3.000.000						0%	0%	0%	100,00%		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum										-	0%	0%	0%	0%		
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.051.918.867	7.555.957.990	519.130.873	599.291.451	123.149.218	2.357.169.480	2.824.986.116	73.288.878	122.874.218		77,24%	37,39%	14,12%	20,50%		Disbudpar
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	616.501.961	1.224.317.348	779.540.104	1.915.737.096	968.631.000	610.978.961	1.220.140.662	779.091.360	1.728.295.663		99,10%	99,66%	99,94%	90,22%		Disbudpar
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PEMANFAATAN DAN PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk/ Jasa bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya											0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		Disbudpar
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkatkan kualitasnya melalui pembekalan sektor kepariwisataan	841.635.000	753.235.000	-	-	-	737.553.575	750.780.300	-	-		87,63%	99,67%	0,00%	100,00%		Disbudpar
Rata-rata capaian kinerja (%)													61,76%	66,93%	39,26%	87,99%		
Predikat Kinerja																		

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Analisa situasi Rencana Strategis Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menggunakan Analisis SWOT dengan melibatkan stakeholder terkait.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Analisa situasi Rencana Strategis Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menggunakan SWOT Analisis dengan melibatkan stakeholder terkait diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Analisa Faktor Lingkungan Internal:

Faktor Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
SDM	Tersedianya institusi pendidikan di bidang pariwisata	Kualitas SDM bidang pariwisata masih rendah Kurangnya minat pelajar pada pendidikan bidang pariwisata
	Pelatihan standarisasi usaha jasa pariwisata	Terbatasnya kuota peserta pelatihan standarisasi usaha jasa pariwisata
	Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisatanya masing-masing	Rendahnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan/pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata secara sinergi
	Tupoksi dan susunan organisasi secara jelas deskripsinya (job description) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan	Rendahnya/belum optimalnya koordinasi antar bidang tugas
DANA	Adanya dukungan dana APBN dan APBD	
	Adanya investasi pada pembangunan objek wisata	Kurang minat investasi pada pembangunan objek wisata Terbatasnya insentif pajak untuk investasi di bidang pariwisata
SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya hotel berbintang, transportasi dan infrastruktur ke dan di objek wisata	Kondisi infrastruktur ke dan di objek wisata belum memadai
POTENSI	Tersedianya RIPPARKAB untuk akselerasi pembangunan pariwisata	RIPPARKAB belum diPerdakan karena dalam proses review materi teknis
	Tersedianya PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah)	PPKD masih dalam proses perampungan
	Sumber daya alam sebagai	Potensi pariwisata yang

	potensi pariwisata bervariasi antara lain laut, pantai, pegunungan, terdapat wisata buatan serta wisata budaya tradisional dan kuliner	merupakan objek-objek wisata belum dikelola secara profesional
--	--	--

2. Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor Eksternal	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
EKONOMI	Kabupaten Minahasa Mengalami Pertumbuhan Perekonomian	Masuknya investasi, tenaga kerja dari negara lain. Peningkatan persaingan antar usaha jasa pariwisata.
KEBIJAKAN	Otonomi daerah memberikan kewenangan untuk menentukan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisatanya masing-masing	Kebijakan /tujuan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata sering berubah seiring pergantian Kepala Daerah. Rendahnya koordinasi dan arahan/pembinaan dalam pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Pelaksanaan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Pemprov.
	Arahan Pemerintah Provinsi untuk program Good Governance memicu Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan sesuai ketentuan dan peraturan.	Pelaksanaan program/kegiatan belum optimal karena menghindari kekeliruan ataupun kurangnya pemahaman terhadap implementasi ketentuan/peraturan yang berlaku. Kurangnya pembinaan/pelatihan/ Sosialisasi tentang ketentuan/peraturan dalam pelaksanaan program Good Governance
SOSIAL	Terbukanya kesempatan kerja yang semakin luas	Dampak negative dari berkembangnya industri pariwisata antara lain: Trafficking, Peredaran Narkoba, Minuman Keras/Alkohol, Situasi keamanan rawan, dll
TEKNOLOGI	Kemajuan Iptek pada pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Rendahnya pemanfaatan Iptek disebabkan rendahnya kapasitasSDM Iptek Keterbatasan dana dalam pemanfaatan Iptek untuk menunjang pengembangan Budpar
LINGKUNGAN	Kondisi lingkungan kondusif untuk pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Pembangunan infrastruktur belum berwawasan pada kebutuhan sarana prasarana pendukung suatu objek wisata. Kondisi geografi objek wisata yang sulit dan keterjangkauan dipengaruhi cuaca

2.5 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat luas, meliputi wisatawan domestik dan mancanegara, masyarakat pelaku budaya dan ekonomi kreatif, pelaku usaha pariwisata, masyarakat umum, serta institusi atau instansi terkait. Sasaran ini mencakup berbagai kelompok yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah.

Kelompok Sasara Pelayanan

1. Wisatawan:
 - a. Wisatawan Domestik: Pengunjung dari dalam negeri yang ingin menikmati objek wisata dan acara budaya.
 - b. Wisatawan Mancanegara: Pengunjung internasional yang tertarik dengan keunikan budaya dan pariwisata suatu daerah.
2. Pelaku Budaya dan Ekonomi Kreatif:
 - a. Seniman dan Pelaku Budaya: Kelompok yang terlibat dalam seni pertunjukan, seni rupa, tradisi, dan kegiatan kebudayaan lainnya.
 - b. Pelaku Ekonomi Kreatif: Individu atau kelompok yang mengembangkan industri kreatif, seperti kuliner, fashion, kerajinan, dan subsektor ekonomi kreatif lainnya.
3. Pelaku Usaha Pariwisata:
 - a. Pengusaha Akomodasi: Hotel, penginapan, dan penyedia akomodasi lainnya.
 - b. Penyedia Jasa Transportasi: Agen perjalanan, penyedia transportasi wisata.
 - c. Pengusaha Jasa Lainnya: Restoran, kafe, toko cinderamata, dan penyedia jasa terkait pariwisata lainnya.
4. Masyarakat Umum:
 - a. Penduduk Lokal: Masyarakat setempat yang menjadi tuan rumah pariwisata dan terlibat dalam pelestarian kebudayaan.
 - b. Masyarakat Pengguna Jasa: Warga yang memanfaatkan fasilitas dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Institusi dan Instansi Lain:
 - a. Pemerintah Daerah dan Pusat: Instansi pemerintah lain yang bekerja sama dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan.
 - b. Lembaga Pendidikan dan Penelitian: Institusi yang melakukan kajian dan penelitian tentang pariwisata dan kebudayaan.
 - c. Organisasi Non-Pemerintah (NGO): Organisasi yang memiliki kepedulian dan berkolaborasi dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.6 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang.

Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata

Suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya yang mampu menjadi destinasi wisata, akan sangat efektif bila hal tersebut didukung dengan pengelolaan kawasan wisata yang optimal. Di Kabupaten Minahasa pengelolaan kawasan wisata belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan oleh belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja;
- b. Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal;
- c. Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis;
- d. Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan

lingkungan dan sarana sanitasi);

- f. Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.

2. Belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah;
- b. Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah;
- c. Belum Optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat;
- d. Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik.

3. Belum efektifnya pemasaran destinasi wisata.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya (kalender event);
- b. Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus;
- c. Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal;
- d. Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi);
- e. Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.

4. Belum efektifnya kelembagaan.

Rendahnya kapasitas kelembagaan merupakan penyebab pengelolaan pariwisata di Kabupaten Minahasa. Meningkatnya kompleksitas manajemen memerlukan penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara memadai dan berkelanjutan. Kapasitas kelembagaan bukan hanya mencakup institusi yang efisien melainkan juga aparatur birokrasi yang berkualitas, serta regulasi yang kuat dan sehat.

Kapasitas kelembagaan yang memadai dapat menjamin ketercapaian stabilitas perekonomian melalui pengelolaan bidang budaya dan pariwisata. Belum efektifnya kapasitas kelembagaan disebabkan oleh beberapa masalah seperti:

- a. Belum optimalnya optimalnya fungsi dan kerjasama antarlembaga pariwisata.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata;
- Kurangnya koordinasi antarskpd dan swasta;
- Rendahnya SDM pelaku jasa pariwisata.

- b. Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;
- Kurangnya pelatihan formal bagi SDM Pariwisata.

Tabel 2.6

Pokok Masalah, Masalah, dan Faktor/Akar Masalah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

No	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata dan kebudayaan	Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu.	• Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja; • Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal; • Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis; • Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan; • Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu- rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi); • Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.
		Belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala.	• Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah; • Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah; • Belum Optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat; • Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik.
		Belum efektifnya pemasaran destinasi wisata.	• Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya (kalender event); • Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus; • Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal; • Belum adanya fokus destinasi yang akan
			• dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi); • Kualitas dan keragaman produk usahadan jasa pariwisata belum maksimal.
2.	Belum efektifnya kelembagaan	Belum optimalnya fungsi dan kerjasama antar lembaga pariwisata.	• Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata; • Kurangnya koordinasi antarskpd dan swasta; • Rendahnya sdm pelaku jasa pariwisata.
		Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:	• Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja; • Kurangnya pelatihan formal bagi SDM pariwisata.

2.7 ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Minahasa berdasarkan akar permasalahan sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 2.6

N O	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1.	Kebudayaan (Bidang Kesenian)	• Dokumentasi dan Inventarisasi seni budaya belum lengkap; • Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk promosi seni budaya belum optimal; • Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kesenian tradisional masih kurang	Optimalisasi pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala
2	Kebudayaan (Bidang Kebudayaan)	• Minimnya literatur dan dokumentasi tentang kebudayaan daerah; • Rendahnya minat Generasi Muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah; • Belum adanya konsep yang baku dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya. • Belum adanya museum daerah	Peningkatan pengelolaan budaya daerah;
3	Pariwisata (Bidang Pariwisata)	• Belum semua kawasan, destinasi wisata dapat dikembangkan dan dikelola; • Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal karena Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata; • Masih kurangnya dokumen Perencanaan Pengembangan kawasan pariwisata; • Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan; • Masih lemahnya SDM pendukung pariwisata	• Peningkatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata, destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;
4	Pariwisata (Ekraf)	• Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat karena belum didukung sarana dan prasarana penunjang yang memadai ; • Masih rendahnya sdm pelaku ekonomi kreatif sebagai pendukung jasa pariwisata.	• Pengembangan Ekonomi Kreatif
6	Pariwisata	Tingkat kunjungan wisatawan yang masih rendah baik lokal maupun mancanegara yang dipengaruhi oleh • Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan; • Minimnya promosi karena Keterbatasan media promosi dan informasi • Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya (kalender event); • Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus; • Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal; • Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.	Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata

2.8 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (RPJPD KAB. MINAHASA TAHUN 2005-2025)

Untuk memahami dan mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam tugas dan fungsi perangkat daerah, diperlukan penelaahan yang cermat terhadap dokumen perencanaan pembangunan, khususnya RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025– 2029. Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah pembangunan sektor pariwisata selama lima tahun ke depan selaras dengan visi, misi, serta program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa yang telah ditetapkan.

Visi RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045. Visi daerah disimpulkan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Penyimpulan visi agar memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 menjadi Tahap I Implementasi RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045. Dalam petahapan RPJPD 2025-2045, tahap pertama menjadi wujud dari kebijakan Periode I, yaitu Penguatan Landas Transformasi Daerah (2025-2029). Pada periode 2025-2029, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa memiliki visi : “MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”. Deskripsi singkat komponen-komponen dasar visi mencakup:

- **PARIWISATA** : Minahasa kawasan pariwisata rumah bagi ragam pariwisata alam, termasuk pantai, danau, kawasan lindung dan wisata buatan, serta budaya.
- **MAJU** : Mewujudkan Minahasa yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, berkompetisi di segala bidang dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. **SEJAHTERA** : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang aman dan makmur serta mampu mengelola pariwisata untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Minahasa sebagai daerah Pariwisata, berangkat dari kondisi faktual Minahasa dengan ragam kekayaan alam yang sangat potensial bagi pengembangan pariwisata. Kondisi geografis Minahasa yang suportif terhadap

visi ini mencakup mulai dari potensi pegunungan (highlands) sampai potensi bahari. Term “daerah” merujuk pada makna Minahasa sebagai daerah dengan ciri khas potensi pariwisata yang bervariasi. Di antaranya, Minahasa dianugerahi dengan kekayaan sosial kemasyarakatan dan budaya yang hangat dan khas. Potensi alam, budaya, sosial dan masyarakat ini menjadi rahim bagi lahirnya diversifikasi pariwisata yang geliat potensinya demikian kentara.

Minahasa sebagai “Daerah pariwisata” menjadi tuan rumah bagi ragam wujud pariwisata yang membentang dari wisata alam (laut, pantai, gunung/berapi, danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam); wisata budaya (upacara budaya, tari-tari tradisional, musik tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, upacara adat, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal), dan wisata buatan (sarana dan fasilitas olah raga, taman rekreasi). Pendekatan di atas mengungkapkan pendekatan berdasar perspektif yang melandasi intervensi, pemberdayaan dan pengembangan seluruh keragaman potensi pariwisata Kabupaten Minahasa. Artinya, Minahasa menjadi satu daerah yang mengakomodasi dan menjadi tuan rumah bagi beragam ragam potensi baik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Pemberdayaan dan pengembangan semua potensi pariwisata ini dilaksanakan melalui intervensi kreatif, inovatif dan berkelanjutan dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan lestari alam. Kekayaan ini secara strategis sejalan dengan proyek strategis nasional, yaitu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan penetapan Pariwisata Likupang. Dalam hubungan dengan proyek strategis nasional tersebut, Minahasa mengambil peran sebagai pendukung DPSP dan KEK Pariwisata dengan menawarkan ragam diversifikasi destinasi pariwisata. Demikian, Minahasa dengan segala kekayaannya menghadirkan potensi suportif dan pelengkap yang efektif. Pengembangan potensi ini tentunya sejalan dan didukung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah Minahasa, serta Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Term “Maju” dalam definisi visi Kabupaten Minahasa merujuk langsung pada Visi Indonesia Emas 2045. Maju menggambarkan Visi Kabupaten Minahasa untuk menjadi daerah yang perekonomiannya mencapai posisi upper middle income society. Menurut ukuran World Bank Tahun Fiskal 2024, upper middle income society mencakup GNI per kapita antara \$4,466 dan \$13,845. Dalam perhitungan RPJPN 2025-2045 dengan memperhitungkan inflasi, upper middle income society pada tahun 2045 diperkirakan berada di bawah \$23,000 (GNI per kapita high income society, sebagai sasaran utama RPJPN 2025-2045, berada dalam rentang \$23,000-\$30,300). Kemajuan yang menjadi visi daerah ini

berlandaskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Daerah “Maju” mendefinisikan Kabupaten Minahasa sebagai daerah yang mengaktualisasikan potensi, daerah yang modern, sejahtera, dan inovatif sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan regional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Minahasa. Peran Kabupaten Minahasa semakin penting dan senantiasa menjadi pendukung yang efektif bagi capaian-capaian nasional.

Juga memberikan gambaran bahwa Kabupaten Minahasa berkemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, berdaya saing yang tinggi di antara daerah-daerah di Indonesia, berketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan nasional, regional dan global, serta memiliki jaminan keadilan sosial yang mumpuni dan mencakup semua masyarakat. Di sisi lain Kabupaten Minahasa harus memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Minahasa, mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Mobilisasi masyarakat menjadi sangat cair karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman dan terjangkau. Infrastruktur modern ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan masyarakat Minahasa terhubung dengan daerah lain dan dunia. Kabupaten Minahasa yang bersumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Kabupaten Minahasa memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan nasional dan global yang kompleks di masa depan.

Kabupaten Minahasa menggagas term “sejahtera” dalam kaitan erat dan menjamin kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai konsekuensi yuridis tapi juga sebagai tanggung jawab moral sebagai warga dunia. Kualitas hidup masyarakat Minahasa ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut berserta isinya terjaga dengan baik.

Visi secara hakiki membutuhkan operasionalisasi demi perwujudannya.

Misi dirumuskan sebagai upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2029. Perumusan misi harus memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Perumusan Misi Kabupaten Minahasa secara linier memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045, yaitu: 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi Tata Kelola; 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan 8) Kestinambungan Pembangunan. Dengan karakteristiknya yang berbeda, Kabupaten Minahasa mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berkeadilan dengan mengutamakan 7 (tujuh) fokus pembangunan sesuai dengan kewenangannya, yaitu: 1) Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan; 2) Peningkatan infrastruktur berkelanjutan; 3) Peningkatan produktivitas daerah; 4) Penguatan daya saing SDM berkelanjutan; 5) Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju; 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan 7) Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan mempertimbangkan agenda Pembangunan nasional dan tujuh fokus Pembangunan nasional, Kabupaten Minahasa menetapkan misi Pembangunan daerah dengan konstruksi yang selaras dengan agenda Pembangunan nasional, yaitu transformasi daerah (misi 1, 2, 3); landasan transformasi daerah (misi 4 dan 5); dan implementasi transformasi daerah (misi 6, 7, dan 8).

2.9 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PARIWISATA, KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF DAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN.

a. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Agar arah pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa tetap berada di jalur yang tepat, sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus terjaga dengan baik. Terlebih lagi Bupati juga menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam upaya membantu tugas Bupati Minahasa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata turut memperhatikan perencanaan pengembangan sektor pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif RI. Namun, dalam tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pariwisata, penelaahan lebih lanjut akan Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif RI belum dapat dilakukan karena kedua kementerian tersebut juga masih dalam proses penyusunan renstra. Telaahan ini akan dilengkapi dalam proses penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025- 2029.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Daerah

diharuskan bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan pariwisata Kabupaten Minahasa terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang diterapkan oleh kementerian tersebut.

Adapun Visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah : **“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan local dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong “.**

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan local.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020- 2024 adalah “Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3

(tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC.

Pada perspektif *stakeholders*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. Pada perspektif *customer*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran yaitu: (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”; (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”; (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”; (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”; (5) “Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”; dan (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif *internal process*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”; (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Pada perspektif *learn and growth*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”.

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf menggambarkan *spirit* dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, Pilar Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pilar Kreativitas.

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 7 arah kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4 strategi: (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (c) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi: (a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi: (a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional, dengan 1 strategi: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional maupun sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah ada Faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

1. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

- a. Adanya visi pembangunan daerah yang menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan.
- b. Peraturan daerah dan rencana induk pengembangan pariwisata sebagai pedoman kerja.

2. Komitmen dan Kerjasama Antar Stakeholder

- a. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi pariwisata, dan pelaku industri kreatif.
- b. Adanya kemitraan dengan komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi.
- c. Sumber Daya Alam dan Budaya yang Melimpah.
- d. Potensi ini menjadi modal utama yang mempermudah penyusunan program dan kegiatan promosi.
- e. Keberagaman atraksi memudahkan pengemasan paket wisata yang bervariasi.

3. Dukungan Teknologi dan Digitalisasi

- a. Pemanfaatan media sosial, website, dan platform promosi daring oleh dinas dan pelaku usaha.
- b. Akses terhadap sistem informasi pariwisata nasional.

4. SDM dengan pengalaman di Bidang Pariwisata

- a. Sebagian staff memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan pelaku industri dan lembaga pendukung.

Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa:

1. Keterbatasan Anggaran Operasional

- a. Alokasi anggaran belum memadai untuk menjangkau seluruh potensi dan kebutuhan promosi.
- b. Keterbatasan dana untuk riset, monitoring, dan evaluasi destinasi.

2. Kapasitas SDM yang belum optimal

- a. a. Masih ada gap keterampilan di bidang teknologi informasi, manajemen event, dan bahasa asing.
 - b. b. Kebutuhan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial.
- 3. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Maksimal
 - a. Sinkronisasi program antar perangkat daerah kadang kurang efektif.
 - b. Ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 4. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Pelayanan
 - a. Fasilitas penunjang seperti pusat informasi wisata, transportasi menuju destinasi, dan signage pariwisata belum merata.
 - b. Sistem data pariwisata daerah belum sepenuhnya terintegrasi.
- 5. Ancaman Eksternal terhadap Destinasi
 - a. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam dapat mengganggu pelayanan dan program kerja.
 - b. Fluktuasi jumlah kunjungan akibat faktor global (pandemi, krisis ekonomi, persaingan antar destinasi)

b. Telahaan Renstra Kementerian Kebudayaan

Adapun Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta

pengembangan bahasa dan sastra; dan

- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2.10 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Minahasa, pelaksanaan program dan kegiatan perlu memperhatikan aspek tata ruang wilayah serta kelestarian lingkungan

hidup. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa menjadi acuan penting dalam penataan ruang yang menjamin harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Telaahan terhadap RTRW menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata perlu diselaraskan dengan zonasi wilayah, terutama dalam pemanfaatan kawasan usaha, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Penempatan usaha yang sesuai dengan fungsi ruang dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan pada tingkat kabupaten memberikan panduan penting bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini mencakup aspek konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah usaha, serta pengendalian pencemaran yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

Dengan mengintegrasikan hasil telaahan RTRW dan KLHS dalam perencanaan dan pelaksanaan program, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya mendorong peningkatan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa.

2.11 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan

aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Tabel 2.7
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

N O	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1.	Kebudayaan (Bidang Kesenian)	• Dokumentasi dan Inventarisasi seni budaya belum lengkap; • Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk promosi seni budaya belum optimal; • Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kesenian tradisional masih kurang	Optimalisasi pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala
2	Kebudayaan (Bidang Kebudayaan)	• Minimnya literatur dan dokumentasi tentang kebudayaan daerah; • Rendahnya minat Generasi Muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah; • Belum adanya konsep yang baku dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya. • Belum adanya museum daerah	Peningkatan pengelolaan budaya daerah;
3	Pariwisata (Bidang Pariwisata)	• Belum semua kawasan, destinasi wisata dapat dikembangkan dan dikelola; • Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal karena Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata; • Masih kurangnya dokumen Perencanaan Pengembangan kawasan pariwisata; • Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan; • Masih lemahnya SDM pendukung pariwisata	• Peningkatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata, destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;
4	Pariwisata (Ekraf)	• Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat karena belum didukung sarana dan prasarana penunjang yang memadai ; • Masih rendahnya sdm pelaku ekonomi kreatif sebagai pendukung jasa pariwisata.	• Pengembangan Ekonomi Kreatif

6	Pariwisata	Tingkat kunjungan wisatawan yang masih rendah baik lokal maupun mancanegara yang dipengaruhi oleh • Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan; • Minimnya promosi karena Keterbatasan media promosi dan informasi • Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya (kalender event); • Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus; • Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal; • Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.	Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata
---	------------	---	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran jangka menengah merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan yaitu dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun.

Gerakan Pembangunan di Kabupaten Minahasa pada Tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah

Berdasarkan Visi Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS Periode Tahun 2025- 2029, yaitu **“MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”**, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetap mendukung dan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2025-2029 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa memberikan peran yang sangat penting dan strategis pada pencapaian Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh”**.

Dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka Tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Daerah tahun 2025-2029 adalah: “Meningkatnya Ekonomi Daerah melalui nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif” dengan sasaran yang akan dicapai tahun 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya berkebudayaan maju dan meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah dengan indikator Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual;
2. Indeks Pembangunan Kebudayaan;
3. Rasio PDRB Penyediaan akomodasi, makan dan minum

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA											
- Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Terwujudnya berkebudayaan maju dan meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	6,45	10,14	13,86	17,61	21,39	25,22	29,09	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,98	1	1,02	1,04	1,06	1,08	1,1	
			Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD (%)	8,68	8,97	9,29	9,65	10,04	10,47	10,94	
		Peningkatan Dimensi Kebudayaan	Persentase Peningkatan Dimensi Kebudayaan (%)	3,74	0,99	1,01	1,04	1,08	1,12	1,17	
		Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat hunian akomodasi (%)	31,99	32,79	33,61	34,45	35,31	36,19	37,1	

		terhadap ketahanan ekonomi									
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Rumusan Strategi merupakan penjabaran langkah-langkah pelaksanaan Sasaran yang akan diambil untuk mencapai Tujuan Pembangunan Daerah. Dalam proses perencanaan pembangunan, penentuan strategi menjadi hal yang krusial mengingat penetapan strategi yang tepat akan membuat pencapaian tujuan pembangunan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Arah Kebijakan merupakan langkah-langkah penjabaran terhadap strategi terpilih yang berisikan serangkaian kerangka pikir untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective).

Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Strategi pembangunan dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk mewujudkan Penjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah; Yaitu Misi yang Kedua : **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh”**.

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Rumusan Strategi merupakan penjabaran langkah-langkah pelaksanaan Sasaran yang akan diambil untuk mencapai Tujuan Pembangunan Daerah. Dalam proses perencanaan pembangunan, penentuan strategi menjadi hal yang krusial mengingat penetapan strategi yang tepat akan membuat pencapaian tujuan pembangunan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Arah Kebijakan merupakan langkah-langkah penjabaran terhadap strategi terpilih yang berisikan serangkaian kerangka pikir untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sesuai dengan analisa akar Masalah, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Peningkatan Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah Minahasa;
- b. Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi;
- c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam lima mendatang disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Dinas Pariwisata Daerah Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah Minahasa dan Peningkatan Daya Saing dan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekraf terhadap ketahanan ekonomi	Pelestarian Kebudayaan Daerah Minahasa dan Peningkatan Daya Saing dan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekraf terhadap ketahanan ekonomi	Pelestarian Kebudayaan Daerah Minahasa dan Peningkatan Daya Saing dan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekraf terhadap ketahanan ekonomi	Pelestarian Kebudayaan Daerah Minahasa dan Peningkatan Daya Saing dan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekraf terhadap ketahanan ekonomi	Pelestarian Kebudayaan Daerah Minahasa dan Peningkatan Daya Saing dan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekraf terhadap ketahanan ekonomi

Tabel 3.2. menunjukkan bahwa setiap tahunnya arah pembangunan pariwisata Kabupaten Minahasa sepanjang lima tahun ke depan tetap sama. Ini dikarenakan arah pembangunan Kabupaten Minahasa dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 menekankan pentingnya ketangguhan perekonomian dalam mewujudkan percepatan, pemantapan, dan perwujudan transformasi Kabupaten Minahasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

3.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

Visi : “MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”,			
Misi 1 : “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh”.			
Tujuan : “Terwujudnya Pembangunan ekonomi daerah”			
Sasaran : “Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah”			
Indikator : PDRB Sektor Pariwisata			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya berkebudayaan maju dan meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif Indikator Tujuan Perangkat Daerah : 1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	1.Peningkatan Dimensi Kebudayaan <i>Indikator :</i> - <i>Persentase Peningkatan Dimensi Kebudayaan</i>	1. Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	1.1 Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
		2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	1.2 Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan
		3. Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	1.3.1 Presentase Warisan Budaya yang dilestarikan 1.3.2 Presentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan
		4.Meningkatkan Pengelolaan Permuseuman	1.4 Peningkatan pemanfaatan Koleksi Museum

		5.Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap informasi Sejarah	1.5 Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap sejarah lokal
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Indikator Tujuan Perangkat Daerah : : 2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2. Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi	1.Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.1 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
		2.Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	2.2 Persentase Peningkatan Media Pemasaran
		3. Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kreatif	2.3 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual
		4. Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kreatif	2.4 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penentuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, yang menjadi acuan dalam penyusunan nomenklatur serta pengalokasian anggaran untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa periode Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.2. dan Tabel 4.3.

TABEL 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							
- Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Terwujudnya berkebudayaan maju dan meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)		
		Peningkatan Dimensi Kebudayaan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan		Persentase Peningkatan Dimensi Kebudayaan (%)		
					Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa	
				Jumlah SDM, lembaga dan Pranata yang dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan tata kelola)	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan kesenian tradisional		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
					Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	
				Jumlah SDM, lembaga dan Pranata yang dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan tata kelola	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan		2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah SDM, lembaga dan Pranata yang dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan tata kelola	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Jumlah Kegiatan pembinaan sejarah lokal yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
				Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
					Jumlah Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan)	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek)	2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya tata kelola museum		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek)	2.22.05.2.03.0001 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan)	2.22.05.2.03.0002 - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	
					Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
		Peningkatan Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Tingkat hunian akomodasi (%)		
					Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Tingkat hunian akomodasi (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Jumlah Daya tarik Unggulan Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pengembangan(Rintisan, Berkembang, pemantapan , revitalisasi	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen)	3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha pariwisata yang telah tersefifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha pariwisata yang telah tersefifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE	
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha)	3.26.02.2.04.0008 - Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	
					Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.04.0009 - Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanna verifikasi)	
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	3.26.02.2.04.0011 - Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
					Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	3.26.02.2.04.0013 - Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Menengah Tinggi)	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Persentase Peningkatan Media Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Jumlah Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
				Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang (17 subsektor)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah / (Kebijakan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem	
					Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem	
					Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual / (Kegiatan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah / (Lembaga)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem	
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	
					Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.02.0004 - Penyediaan Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha)	3.26.04.2.02.0011 - Fasilitas pemberian insentif	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitas penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	3.26.04.2.02.0014 - Fasilitas penguatan Kekayaan Intelektual	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	3.26.04.2.02.0017 - Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	
					Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02.0018 - Penyusunan Skema Insentif Daerah	
					Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah (Kebijakan)	3.26.04.2.02.0019 - Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02.0022 - Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Jumlah Pelatihan pengembangan profesionalisme bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0005 - Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01.0010 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Presentase SDM Peserta Pembekalan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	3.26.05.2.02.0002 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
					Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	3.26.05.2.02.0004 - Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	
					Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0005 - Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0006 - Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Bersih.			Nilai SAKIP (Predikat)		
					Nilai SAKIP (Predikat)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.22.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.22.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Persentase ASN yang Terpenuhi Hak-hak Keuangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.22.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.22.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.22.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi		2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan (Dokumen)	2.22.01.2.05 - Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.22.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.22.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.22.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.22.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.22.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Administrasi Umum yang Terasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.22.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.22.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	

TABEL 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.135.469.429,00		5.128.152.000,00		5.474.584.000,00		5.821.814.000,00		6.185.405.000,00		
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.012.342.029,00		4.300.000.000,00		4.600.000.000,00		4.900.000.000,00		5.200.000.000,00		
Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional	Nilai SAKIP (Predikat)	BB	BB	4.012.342.029,00	BB	4.300.000.000,00	A	4.600.000.000,00	A	4.900.000.000,00	A	5.200.000.000,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.205.756,00		12.741.062,70		13.303.135,97		13.893.312,26		14.512.997,38		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	11.205.756,00	1	12.741.062,70	1	13.303.135,97	1	13.893.312,26	1	14.512.997,38		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1		1		1		1		1			1
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1			1
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			1
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			1
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1		1		1		1		1			1
2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-					4.820.715,00				5.061.750,75				5.314.838,29	
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	4.820.715,00	1	5.061.750,75	1	5.314.838,29	1	5.580.580,20	1	5.859.609,21		
2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.002.219,00		1.052.329,95		1.104.946,45		1.160.193,77		1.218.203,46		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	1.002.219,00	1	1.052.329,95	1	1.104.946,45	1	1.160.193,77	1	1.218.203,46		
2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.499.610,00		1.499.610,00		1.499.610,00		1.499.610,00		1.499.610,00		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.499.610,00		1.499.610,00		1.499.610,00		1.499.610,00		1.499.610,00		
2.22.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				3.883.212,00		3.127.372,00		3.383.741,23		4.652.928,29		4.935.574,71		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	3.883.212,00	1	3.127.372,00	1	3.383.741,23	1	4.652.928,29	1	4.935.574,71		
2.22.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.22.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral				0,00		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	0,00	1	1.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		0,00		1.000.000,00		0,00		0,00		
Tertaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Linkun Perangkat Daerah	0	1	0,00	1	0,00	1	1.000.000,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.962.517.256,00		3.111.642.778,80		3.267.224.917,74		3.430.586.163,63		3.602.115.471,22		
Persentase ASN yang Terpenuhi Hak-hak Keuangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	20	2.962.517.256,00	20	3.111.642.778,80	20	3.267.224.917,74	20	3.430.586.163,63	20	3.602.115.471,22		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa an Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengeuian/Verifikasi	80	80		80		80		80		80			
2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.956.517.163,00		3.104.343.021,15		3.259.560.172,21		3.422.538.180,82		3.593.665.089,86		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Juman Orang yang Menerima Gaji dan	16	20	2.956.517.163,00	20	3.104.343.021,15	20	3.259.560.172,21	20	3.422.538.180,82	20	3.593.665.089,86		
2.22.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN				0,00		999.660,00		1.049.643,00		1.102.125,15		1.157.231,41		
Tersedianya Administ rasi Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administ rasi Pelaksanaa n Tugas ASN	1	1	0,00	1	999.660,00	1	1.049.643,00	1	1.102.125,15	1	1.157.231,41		
2.22.01.2.02.0003 - Pelaksa naan Penatausahaan dan Pengeuian/Verifikasi Keu angan				999.660,00		1.049.643,00		1.102.125,15		1.157.231,41		1.215.092,98		
Tertak sananya Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keu angan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi	80	80	999.660,00	80	1.049.643,00	80	1.102.125,15	80	1.157.231,41	80	1.215.092,98		
2.22.01.2.02.0004 - Koordi nasi dan Pelaksa naan Akuntansi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertak sananya Koordi nasi dan Pelaksa naan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksa naan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.01.2.02.0005 - Koordi nasi dan Penyus unan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.164,00		2.625.172,20		2.756.430,81		2.894.252,35		3.038.964,97		
Tersedianya Lapo ran Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapo ran Hasil Koordi nasi Penyus unan Lapo ran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapo ran Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapo ran Hasil Koordi nasi Penyus unan Lapo ran Keuangan Akhir Tahun	1	1	2.500.164,00	1	2.625.172,20	1	2.756.430,81	1	2.894.252,35	1	3.038.964,97		
2.22.01.2.02.0006 - Pengelo laan dan Penyia pan Bahan Tanggapan Pemerik saan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokum en Bahan Tangga pan Pemerik saan dan Tindak Lanjut Pemerik saan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerik saan dan Tindak Lanjut Pemerik saan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.01.2.02.0007 - Koordi nasi dan Penyus unan Lapo ran Keuangan Bulanan/ Triwulan an/				2.500.269,00		2.625.282,45		2.756.546,57		2.894.373,90		3.039.092,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	2	2.500.269,00	2	2.625.282,45	2	2.756.546,57	2	2.894.373,90	2	3.039.092,00		
2.22.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada				2.499.521,00		3.623.496,65		3.804.671,88		3.994.904,68		4.194.650,64		
Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	2.499.521,00	1	3.623.496,65	1	3.804.671,88	1	3.994.904,68	1	4.194.650,64		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0					
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	0	0		0		0		0					
	Penilaian Barang Milik													
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1	1		1		1		1					
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
2.22.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				500.000,00		525.000,00		551.250,00		578.812,00		607.752,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	525.000,00	1	551.250,00	1	578.812,00	1	607.752,00		
2.22.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		999.000,00		1.048.950,00		1.101.397,00		1.156.467,38		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	0,00	1	999.000,00	1	1.048.950,00	1	1.101.397,00	1	1.156.467,38		
2.22.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				999.688,00		1.049.672,00		1.102.156,00		1.157.264,00		1.215.128,00		
Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1	1	999.688,00	1	1.049.672,00	1	1.102.156,00	1	1.157.264,00	1	1.215.128,00		
2.22.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				999.833,00		1.049.824,65		1.102.315,88		1.157.431,68		1.215.303,26		
Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	999.833,00	1	1.049.824,65	1	1.102.315,88	1	1.157.431,68	1	1.215.303,26		
2.22.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				61.771.569,00		158.615.191,45		102.706.250,00		228.235.162,50		294.646.920,63		
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	61.771.569,00	20	158.615.191,45	0	102.706.250,00	20	228.235.162,50	20	294.646.920,63		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1		1		1		1		1			
2.22.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17.850.000,00		49.950.000,00		79.950.000,00		83.947.500,00		88.144.875,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	17.850.000,00	2	49.950.000,00	2	79.950.000,00	2	83.947.500,00	2	88.144.875,00		
2.22.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000,00		2.625.000,00		2.756.250,00		2.894.062,50		3.038.765,63		
Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	2.500.000,00	1	2.625.000,00	1	2.756.250,00	1	2.894.062,50	1	3.038.765,63		
2.22.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	0	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.22.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				41.421.569,00		20.000.000,00		20.000.000,00		41.393.600,00		43.463.280,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	0	20	41.421.569,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	41.393.600,00	20	43.463.280,00				
2.22.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		36.040.191,45		0,00		50.000.000,00		100.000.000,00				
Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00	20	36.040.191,45	0	0,00	20	50.000.000,00	20	100.000.000,00				
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				169.488.085,00		189.594.130,20		204.962.586,22		221.688.340,87		248.759.967,53				
Persentase Administrasi Umum yang Terasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	169.488.085,00	1	189.594.130,20	1	204.962.586,22	1	221.688.340,87	1	248.759.967,53				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0					
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0		0		0		0		0					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)															
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)															
	2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		998.445,00		1		1.048.367,25				1	1.100.785,61
2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	43.421.569,00	1	51.870.879,95	1	54.464.423,95	1	57.187.646,14	1	60.047.027,00				
2.22.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		0				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan				2.999.900,00		3.149.895,00		3.307.389,75		3.472.759,24		3.646.397,20		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2.999.900,00	1	3.149.895,00	1	3.307.389,75	1	3.472.759,24	1	3.646.397,20		
2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.22.01.2.06.0008 - Fasilitas i Kunjungan Tamu				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		19.969.031,25		
Terlaksananya Fasilitas i Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas i Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	19.969.031,25		
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat				107.068.171,00		117.774.988,00		129.552.486,91		142.507.735,60		163.883.895,94		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2	2	107.068.171,00	2	117.774.988,00	2	129.552.486,91	2	142.507.735,60	2	163.883.895,94		
2.22.01.2.06.0010 - Penatausahaan Ars ip Dinamis				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penatausahaan Ars ip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ars ip Dinamis pada SKPD			0		0		0		0		0		
2.22.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				27.750.000,00		50.088.761,00		643.044.150,67		618.325.132,93		179.150.976,82		
Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2	27.750.000,00	2	50.088.761,00	2	643.044.150,67	3	618.325.132,93	3	179.150.976,82		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		0		1		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0							
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	0		4		4		4					
2.22.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		560.450.951,62		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0,00	0	0,00	1	560.450.951,62	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		20.951.261,00		21.998.824,05		76.995.884,18		80.845.678,38		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	0	0,00	4	20.951.261,00	4	21.998.824,05	4	76.995.884,18	4	80.845.678,38		
2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.750.000,00		29.137.500,00		60.594.375,00		93.624.093,75		98.305.298,44		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	27.750.000,00	2	29.137.500,00	2	60.594.375,00	3	93.624.093,75	3	98.305.298,44		
2.22.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		447.705.155,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	447.705.155,00	0	0,00		
2.22.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				241.157.712,00		253.215.597,60		265.876.377,48		279.170.196,25		293.128.706,17		
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	241.157.712,00	12	253.215.597,60	12	265.876.377,48	12	279.170.196,25	12	293.128.706,17		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1		1		1							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1		1		1							
2.22.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.062,50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50		
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya				19.947.712,00		20.945.097,60		21.992.352,48		23.091.970,00		24.246.568,61		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	19.947.712,00	12	20.945.097,60	12	21.992.352,48	12	23.091.970,00	12	24.246.568,61		
2.22.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.210.000,00		221.770.500,00		232.859.025,00		244.501.976,25		256.727.075,06		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	211.210.000,00	12	221.770.500,00	12	232.859.025,00	12	244.501.976,25	12	256.727.075,06		
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				535.952.130,00		520.478.981,60		99.077.910,04		104.106.786,88		563.490.309,61		
Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai RKPMD	Jumlah Perawatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	535.952.130,00	2	520.478.981,60	2	99.077.910,04	2	104.106.786,88	2	563.490.309,61		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	0		2		2		2		2			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		0		0		0		0			
2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				38.480.000,00		40.404.000,00		42.424.200,00		44.545.410,00		46.772.680,50		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	1	38.480.000,00	1	40.404.000,00	1	42.424.200,00	1	44.545.410,00	1	46.772.680,50		
2.22.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00		
Tertaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	0	0,00	2	2.000.000,00	2	2.100.000,00	2	2.205.000,00	2	2.315.250,00		
2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan				0,00		3.074.981,60		3.303.710,04		3.543.876,88		3.796.052,11		
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	0,00	2	3.074.981,60	2	3.303.710,04	2	3.543.876,88	2	3.796.052,11		
2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan				497.472.130,00		475.000.000,00		51.250.000,00		53.812.500,00		510.606.327,00		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	497.472.130,00	1	475.000.000,00	1	51.250.000,00	1	53.812.500,00	1	510.606.327,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				217.049.000,00		233.152.000,00		244.809.000,00		257.050.000,00		269.902.000,00		
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0,531	0,547	217.049.000,00	0,556	233.152.000,00	0,564	244.809.000,00	0,573	257.050.000,00	0,581	269.902.000,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah				122.049.000,00		132.049.000,00		142.049.000,00		152.049.000,00		162.049.000,00		
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan rehabilitasi)	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1	1	122.049.000,00	1	132.049.000,00	1	142.049.000,00	1	152.049.000,00	1	162.049.000,00		
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan	0	9		9		9		9		9			
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata		81		81		81		81		81			
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				55.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan	0	9	55.000.000,00	9	65.000.000,00	9	75.000.000,00	9	85.000.000,00	9	95.000.000,00		
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata		81	0,00	81	0,00	81	0,00	81	0,00	81	0,00		
2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				67.049.000,00		67.049.000,00		67.049.000,00		67.049.000,00		67.049.000,00		
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan	1	1	67.049.000,00	1	67.049.000,00	1	67.049.000,00	1	67.049.000,00	1	67.049.000,00		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Persentase Penduduk 15 Tahun				0,00		6.103.000,00		7.760.000,00		10.001.000,00		12.853.000,00		
ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0	5	0,00	5	6.103.000,00	5	7.760.000,00	5	10.001.000,00	5	12.853.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	0	4		4		4		4		4			
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				0,00		6.103.000,00		7.760.000,00		10.001.000,00		12.853.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	0	5	0,00	5	6.103.000,00	5	7.760.000,00	5	10.001.000,00	5	12.853.000,00		
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	0	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Jumlah SDM, lembaga dan Pranata yang dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan sertifikasi, serta	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	0	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		81		81		81		81		81			
2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan		1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		81	95.000.000,00	81	95.000.000,00	81	95.000.000,00	81	95.000.000,00	81	95.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN				247.178.400,00		260.000.000,00		275.000.000,00		290.000.000,00		320.000.000,00		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	50,00	62,50	247.178.400,00	75,00	260.000.000,00	87,50	275.000.000,00	100,00	290.000.000,00	100,00	320.000.000,00	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah				247.178.400,00		260.000.000,00		275.000.000,00		290.000.000,00		320.000.000,00		
Jumlah SDM, lembaga dan Prana yang dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	4	247.178.400,00	4	260.000.000,00	4	275.000.000,00	4	290.000.000,00	4	320.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	0	20		20		30		30		30			
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian				195.603.905,00		203.082.355,00		216.732.355,00		219.846.618,00		220.279.775,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan)	0	50	195.603.905,00	50	203.082.355,00	50	216.732.355,00	50	219.846.618,00	50	220.279.775,00		
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	0	20	0,00	20	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00		
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				51.574.495,00		56.917.645,00		58.267.645,00		70.153.382,00		99.720.225,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	4	51.574.495,00	4	56.917.645,00	4	58.267.645,00	4	70.153.382,00	4	99.720.225,00		
Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan				0		0		0		0		0		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0,50	0,00	0,50	50.000.000,00	0,50	55.000.000,00	0,50	60.000.000,00	0,50	65.000.000,00	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu)				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Jumlah Kegiatan pembinaan sejarah lokal yang dilaksanaka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan	0	0	0,00	0	50.000.000,00	0	55.000.000,00	1	60.000.000,00	0	65.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang	0			25		25		0		25			
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		0,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang	0		0,00	25	50.000.000,00	25	55.000.000,00	0	0,00	25	40.000.000,00		
2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana				0,00		0,00		0,00		40.000.000,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40.000.000,00	0	0,00		
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				0,00		0,00		0,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN				210.000.000,00		220.000.000,00		231.525.000,00		243.102.000,00		255.257.000,00		
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	8,86	210.000.000,00	12,52	220.000.000,00	8,91	231.525.000,00	16,21	243.102.000,00	19,88	255.257.000,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	3,64	7,27		10,91		12,73		14,55		18,18			
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat				160.000.000,00		170.000.000,00		181.525.000,00		193.102.000,00		205.257.000,00		
Regis ter cagar budaya (pendaftaran,pengis ian,penetapa n.pencatatan,pemerinzkatan,pen	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0	2	160.000.000,00	2	170.000.000,00	2	181.525.000,00	2	193.102.000,00	2	205.257.000,00		
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah wansan budaya Tak Benda yang Diusulkan	2	2		2				2		2			
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0	2	15.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				86.700.000,00		86.700.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0	2	86.700.000,00	2	86.700.000,00	2	90.000.000,00	2	95.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda				58.300.000,00		58.300.000,00		61.525.000,00		68.102.000,00		75.257.000,00		
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah wansan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	2	2	58.300.000,00	2	58.300.000,00		61.525.000,00	2	68.102.000,00	2	75.257.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan,zonas i,pemeliha raan dan pemugaran)	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	0		0		0		0					
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	4		4		4		4		4			
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar	0	0		0		0		0					
2.22.05.2.03.0001 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.05.2.03.0002 - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				448.900.000,00		65.000.000,00		68.250.000,00		71.662.000,00		75.246.000,00		
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	2	448.900.000,00	5	65.000.000,00	9	68.250.000,00	14	71.662.000,00	20	75.246.000,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				448.900.000,00		65.000.000,00		68.250.000,00		71.662.000,00		75.246.000,00		
Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	0	0	448.900.000,00	0	65.000.000,00	0	68.250.000,00	0	71.662.000,00	0	75.246.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara	0	1		0		1		1		1			
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	0	0		0		0		0		0			
2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara				3.900.000,00		0,00		3.250.000,00		6.662.000,00		5.246.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara	0	1	3.900.000,00	0	0,00	1	3.250.000,00	1	6.662.000,00	1	5.246.000,00		
2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia				5.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan	0	50	5.000.000,00	50	65.000.000,00	50	65.000.000,00	50	65.000.000,00	50	70.000.000,00		
2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				440.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0	1	440.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.357.006.000,00		6.699.877.000,00		7.034.891.000,00		7.386.636.000,00		7.755.967.000,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK				3.655.366.000,00		3.838.114.000,00		4.030.041.000,00		4.231.543.000,00		4.443.120.000,00		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	5	6	3.655.366.000,00	6,5	3.838.114.000,00	7	4.030.041.000,00	7,5	4.231.543.000,00	8	4.443.120.000,00	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	Tingkat hunian akomodasi (%)	31,99	33,61		34,45		35,31		36,19		37,10			
	Persentase Penurunan Kunjungan Wisatawan	4	5		5		5		5		5			
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				820.000.000,00		582.500.000,00		273.790.320,00		561.858.868,00		793.119.453,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Daya tarik Unggulan Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pengembangan/Rintis an.	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	0	50	820.000.000,00	40	582.500.000,00	0	273.790.320,00	40	561.858.868,00	40	793.119.453,00		
	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis an, Berkembang, Pemanfaatan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan	0	2		2		2		2		2			
3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata				250.000.000,00		312.500.000,00		253.790.320,00		291.858.868,00		523.119.453,00		
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintis an, Berkembang, Pemanfaatan)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis an, Berkembang, Pemanfaatan)	0	1	250.000.000,00	1	312.500.000,00	1	253.790.320,00	1	291.858.868,00	1	523.119.453,00		
3.26.02.2.01.0006 - Peningkatan Daya Tarik Wisata Unggulan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan	0	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan				200.000.000,00		250.000.000,00		0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	0	50	200.000.000,00	40	250.000.000,00	0	0,00	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00		
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan				350.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan	0	1	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.02 - Peningkatan Kawasan Strategis Pariwisata				1.935.366.000,00		2.120.614.000,00		2.155.000.680,00		2.245.000.664,00		2.155.082.906,00		
Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	0	3	1.935.366.000,00	3	2.120.614.000,00	3	2.155.000.680,00	3	2.245.000.664,00	3	2.155.082.906,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang	0	20		30		30		30		50			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	1	3		3		3		3					
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		0		0		0					
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	0	4		4		4		4					
	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	0	0		0		1		0					
	3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata				0,00				0,00					
Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	0	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				350.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata				1.470.366.000,00		1.975.614.000,00		2.000.000.680,00		2.100.000.664,00		1.885.082.906,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	1	3	1.470.366.000,00	3	1.975.614.000,00	3	2.000.000.680,00	3	2.100.000.664,00	3	1.885.082.906,00		
3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	0	3	0,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata				100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang	0	20	100.000.000,00	30	125.000.000,00	30	125.000.000,00	30	125.000.000,00	50	250.000.000,00		
3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	0	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00						
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata				900.000.000,00		1.135.000.000,00		1.601.250.000,00		1.424.683.468,00		1.494.917.641,00						
Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	1	900.000.000,00	0	1.135.000.000,00	0	1.601.250.000,00	0	1.424.683.468,00	0	1.494.917.641,00						
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan)	0	2												2	2	2	2
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	1												1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE	0	0												0	3	3	4
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata an Daerah	0	0												0	1	0	1
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	4												4	4	4	4
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	0	1												1	1	1	1
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	0	2												2	2	2	2
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	0	5												5	5	5	5
3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata				0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00						
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	1	0,00	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				900.000.000,00		1.125.000.000,00		1.181.250.000,00		1.404.683.468,00		1.474.917.641,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	0	5	900.000.000,00	5	1.125.000.000,00	5	1.181.250.000,00	5	1.404.683.468,00	5	1.474.917.641,00		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah				0,00		0,00		400.000.000,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah	0	0	0,00	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	1	0,00		
3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE	0	0	0,00	0	0,00	3	0,00	3	0,00	4	0,00		
3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata				0,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	4	0,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di tingkat Kab/Kota	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha	0	0		0		0		0		0			
	Berbasis Risiko (Tingkat Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan	0	0		0		0		0		0			
	CHSE yang dibina dan													
3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Pemenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Pemenpar No 13 tahun 2020 dan SNI	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.04.0008 - Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.04.0009 - Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di tingkat Kab/Kota	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.04.0011 - Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.04.0013 - Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasnya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				2.349.474.000,00		2.466.948.000,00		2.590.295.000,00		2.719.810.000,00		2.855.800.000,00		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	61,54	69,23	2.349.474.000,00	76,92	2.466.948.000,00	85	2.590.295.000,00	92,31	2.719.810.000,00	100	2.855.800.000,00	2.22.3.26.0.00.01. 0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata				2.349.474.000,00		2.466.948.000,00		2.590.295.000,00		2.719.810.000,00		2.855.800.000,00		
Persentase Peningkatan Media Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran	0	5	2.349.474.000,00	5	2.466.948.000,00	5	2.590.295.000,00	5	2.719.810.000,00	5	2.855.800.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	0	8		8		9		9		9			
	Kabupaten/Kota, Baik Dalam Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam	0	4		5		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan	0	4		7		12		13		18			
	Pariwisata Dalam dan Luar Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0	12		13		13		13		13			
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				80.000.000,00		81.822.500,00		83.210.000,00		84.597.500,00		85.985.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam	0	8	80.000.000,00	8	81.822.500,00	9	83.210.000,00	9	84.597.500,00	9	85.985.000,00		
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar				10.850.000,00		15.850.000,00		17.100.000,00		20.537.500,00		25.865.625,00		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar	0	4	10.850.000,00	7	15.850.000,00	12	17.100.000,00	13	20.537.500,00	18	25.865.625,00		
3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				22.200.000,00		25.680.000,00		29.160.000,00		31.480.000,00		33.800.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran	0	5	22.200.000,00	5	25.680.000,00	5	29.160.000,00	5	31.480.000,00	5	33.800.000,00		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2.207.565.110,00		2.313.595.500,00		2.428.825.000,00		2.548.195.000,00		2.670.149.375,00		
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0	12	2.207.565.110,00	13	2.313.595.500,00	13	2.428.825.000,00	13	2.548.195.000,00	13	2.670.149.375,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				28.858.890,00		30.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam	0	4	28.858.890,00	5	30.000.000,00	6	32.000.000,00	6	35.000.000,00	6	40.000.000,00		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN				3.499.000,00		28.715.000,00		30.150.000,00		31.658.000,00		33.241.000,00		
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	20	3.499.000,00	20	28.715.000,00	20	30.150.000,00	20	31.658.000,00	20	33.241.000,00	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan				0,00		11.225.465,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Prasarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Jumlah Prasarana dan Prasarana Kota Kreatif yang	0	0	0,00	1	11.225.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi				0,00		11.225.465,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang	0	0	0,00	1	11.225.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				3.499.000,00		17.489.535,00		30.150.000,00		31.658.000,00		33.241.000,00		
Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang (17 subsektor)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0	0	3.499.000,00	0	17.489.535,00	0	30.150.000,00	0	31.658.000,00	0	33.241.000,00		
	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah terlaksanakanya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	0	1		2		2		3		3			
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0	0	0	0	0	0	0						
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	25	25	25	25	25	25						
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku	0	0	0	0	0	0	0						
	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan	0	0	0	0	0	0	0	0					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang	0	1		1		1		1					
	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung	0	0		0		0		0					
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif	0	0		0		0		0					
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan	0	13		13		15		15					
	Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	0		0		0		0					
	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan													
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan	0	0	0	0	0									
3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.2.02.0003 - Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.2.02.0004 - Penyediaan Infrastruktur				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
3.26.04.2.02.0005 - Pengembangan Sistem				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				3.499.000,00		3.600.000,00		4.800.000,00		5.000.000,00		6.150.000,00		
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	13	3.499.000,00	13	3.600.000,00	13	4.800.000,00	15	5.000.000,00	15	6.150.000,00		
3.26.04.2.02.0011 - Fasilitas pemberian insentif				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya fasilitas pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.2.02.0014 - Fasilitas penguatan Kekayaan Intelektual				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual 3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitas penguatan kekayaan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah 3.26.04.2.02.0017 - Pendukung Pemasaran	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Terlaksanakanya dukungan pemasaran ekonomi kreatif 3.26.04.2.02.0018 - Penyusunan Skema Insentif Daerah	Jumlah terlaksanakanya dukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	0	1	0,00	2	13.889.535,00	2	16.639.535,00	3	16.639.535,00	3	16.639.535,00		
Terlaksananya skema insentif ekonomi kreatif daerah 3.26.04.2.02.0019 - Formulasi Kebijakan Pengembangan	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif 3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0022 - Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	25	0,00	25	0,00	25	8.710.465,00	25	10.018.465,00	25	10.451.465,00		
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Terakreditasi (Persentase)	25,89	26,28	348.667.000,00	26,41	366.100.000,00	26,54	384.405.000,00	26,67	403.625.000,00	26,80	423.806.000,00	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
				200.557.720,00		217.990.720,00		236.295.720,00		255.515.720,00		275.696.720,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Pelatihan pengembangan profesionalisme bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang	0	60	200.557.720,00	60	217.990.720,00	60	236.295.720,00	60	255.515.720,00	60	275.696.720,00		
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	0	25		25		25		25		25			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi	0	0		0		0		0		0			
	Konsumsi dan Konservasi	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan	0	60		80		80		80		80			
3.26.05.2.01.0005 - Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi				48.859.095,00		26.989.535,00		31.639.535,00		31.573.490,00		42.752.990,00		
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0	60	48.859.095,00	80	26.989.535,00	80	31.639.535,00	80	31.573.490,00	80	42.752.990,00		
3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				24.444.285,00		0,00		0,00		19.319.460,00		22.122.035,00		
Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan	0	50	24.444.285,00	50	0,00	50	0,00	50	19.319.460,00	50	22.122.035,00		
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk				107.174.340,00		168.311.185,00		170.236.185,00		175.032.770,00		179.731.695,00		
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata (Orang)	0	50	107.174.340,00	50	168.311.185,00	50	170.236.185,00	50	175.032.770,00	50	179.731.695,00		
3.26.05.2.01.0010 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang	0	60	0,00	60	0,00	60	0,00	60	0,00	60	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				20.080.000,00		22.690.000,00		34.420.000,00		29.590.000,00		31.090.000,00		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	0	25	20.080.000,00	25	22.690.000,00	25	34.420.000,00	25	29.590.000,00	25	31.090.000,00		
Presentase SDM Peserta Pembekalan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0	0	148.109.280,00	0	148.109.280,00	0	148.109.280,00	0	148.109.280,00	0	148.109.280,00		
	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi	0	60		60		60		60		60			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah	0	0		0		0		0		0			
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				148.109.280,00		148.109.280,00		148.109.280,00		148.109.280,00		148.109.280,00		
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi	0	60	148.109.280,00	60	148.109.280,00	60	148.109.280,00	60	148.109.280,00	60	148.109.280,00		
3.26.05.2.02.0002 - Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksanya Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.05.2.02.0004 - Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05.2.02.0005 - Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.05.2.02.0006 - Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.05.2.02.0007 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

4.2 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melaksanakan sejumlah sub kegiatan yang bersifat operasional, teknis, dan administratif. Sub kegiatan tersebut merupakan turunan langsung dari kegiatan utama dan dirancang untuk menjamin ketercapaian output serta outcome sesuai indikator kinerja yang telah dicapai. Setiap sub kegiatan dilaksanakan secara terarah, efisiensi dan sesuai yang mendukung pelayanan dasar dan konektivitas wilayah.

Melalui pelaksanaan subkegiatan yang tepat dan terintegrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian program strategis pembangunan daerah, seperti tabel berikut:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
1.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
2.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Daerah Kabupaten/Kota	
3.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

4.3 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa diukur melalui indikator yang telah ditetapkan. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang terpilih dan mencerminkan tingkat pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. IKK berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan tertentu, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menjadi IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selama 5 (lima) tahun ke depan seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	6,45	10,14	13,86	17,61	21,39	25,22	29,09	
3.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	
4.	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD	%	8,68	8,97	9,29	9,65	10,04	10,47	10,94	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja yang akan menjadi IKK Urusan Kepariwisata dan 8 (delapan) indikator kinerja yang akan menjadi IKK Urusan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun ke depan. IKK Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(0)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
A	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.	Persentase Peningkatan Dimensi Kebudayaan		%	3,74	0,99	1,01	1,04	1,08	1,12	1,17	
3.	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum		Persentase	0	0	2	5	9	14	20	
4.	Nilai SAKIP		Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A	
5.	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan		Persentase	50,00	50,00	62,50	75,00	87,50	100,00	100,00	
6.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		Persentase	0,531	0,539	0,547	0,556	0,564	0,573	0,581	
7.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	komulatif	Persentase	0	0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
8.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		Persentase	0	5,20	8,86	12,52	8,91	16,21	19,88	
9.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		Persentase	3,64	3,64	7,27	10,91	12,73	14,55	18,18	
B	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
11.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)		Ribu Orang	32.555	33.206	34.036	34.887	35.934	37.012	38.307	
12.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		Persentase	0	0	20	20	20	20	20	
13.	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	positif	Persentase	25,89	26,01	26,28	26,41	26,54	26,67	26,80	
14.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	komulatif	Persentase	61,54	61,54	69,23	76,92	85	92,31	100	
15.	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	positif	%	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	
16.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	positif	Persentase	4	4	5	5	5	5	5	
17.	Tingkat hunian akomodasi		%	31,99	32,79	33,61	34,45	35,31	36,19	37,10	
18.	Jumlah Produk/ Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya	komulatif	Produk	0	0	1	1	1	1	1	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah yang selaras dengan Visi Bupati Minahasa ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP dan Wakil Bupati Minahasa VANDA SARUNDAJANG, S.S yaitu “MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”.

Dokumen ini mengacu pada RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025- 2029, serta kebijakan nasional dan daerah lainnya. Renstra ini menegaskan pentingnya perencanaan yang berbasis data, sinergi lintas sektor, serta pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi Renstra ini akan dilakukan dengan mengacu pada prinsip keterpaduan dan konsistensi untuk memastikan setiap program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, efektivitas dan efisiensi dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia, serta akuntabilitas dan transparansi guna menjamin setiap kebijakan dan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Renstra, mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan guna mengukur tingkat keberhasilan serta kendala yang dihadapi. Selain itu, pelaporan berkala menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, diikuti dengan penyusunan rekomendasi perbaikan berbasis data dan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan di masa mendatang. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan juga menjadi bagian penting dalam mendukung analisis yang lebih akurat dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan responsif terhadap tantangan masa depan.

Dan selanjutnya kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah bekerja keras membantu penyusunan dokumen Renstra ini. Atas partisipasi yang diberikan, kami menyampaikan

terima kasih dan rasa penghargaan yang sangat tinggi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 berkomitmen untuk melaksanakan rencana strategis ini secara konsisten, adaptif terhadap dinamika global, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima demi terwujudnya Kabupaten Minahasa yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Tondano, Oktober 2025

**Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MINAHASA,**

FENTY T.W.LAPIAN, SE

PEMBINA TKT I

NIP.19681002 198803 2 008